

**KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PEMBINAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR**

**SYARIFAH HUZAIFAH**

**Nomor Stambuk : 105610548215**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PEMBINAAN PEDAGANG  
KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan Diajukan Oleh

SYARIFAH HUZAIFAH

Nomor Stambuk : 105610548215

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**PERSETUJUAN**


Judul Skripsi Penelitian : Koordinasi Antar Instansi dalam Pembinaan  
Pedagan Kaki Lima di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Syarifah Huzairah  
Nomor Stambuk : 105610548215  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abdul Mulyar, M.Si

  
Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. Hj. Ihsani Malik, S.Sos., M.Si

  
Nusrul Husni, S.Sos., M.PA


## PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisispol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0036/FSP/A-4-IL/VI/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2019.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekertaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)

2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

3. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

4. Dr. Anwar parawangi, M.Si

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## ABSTRAK

**Syarifah Huzaifah. Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar**(dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Samsir Rahim)

Koordinasi antar organisasi/lembaga pada saat ini sangat berperan penting dalam sebuah organisasi untuk dapat tercapainya produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan antar organisasi terkait bahkan perlu sebuah tim pekerja (*Team Work*) yang lebih strategik untuk melaksanakan kegiatan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek kesatuan tindakan, mengetahui Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek komunikasi, mengetahui Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek pembagian kerja

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dimana penulis mewawancarai 6 informan, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi berjalan sesuai dengan garis komando yang telah ditetapkan, melakukan penertiban berdasarkan laporan dari kantor kecamatan. mencapai komunikasi yang efektif, tiap-tiap organisasi pemerintah daerah yang berwenang harus mampu memposisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan informasi.

**Kata Kunci** : *Koordinasi Instansi, Pedagang Kaki Lima*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Koordinasi Antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar**”. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan perspektif penulis dalam memaknai sesuatu.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril dan material. Serta kepada Bapak **Dr. Abdul Mahsyar, M.Si** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.si** selaku pembimbing II, atas waktu luangnya yang diberikan di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari perumusan judul, penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terima kasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu serta memberikan pengaruh kepada penulis yaitu :

1. Bapak Rektor **Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E, M.M** atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Nasrulhaq, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para dosen dan staf yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan program studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di UNISMUH Makassar.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh informan yang berada pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja, Pegawai pada Kantor Kecamatan Makassar dan Rappocini beserta Pedagang Kaki Lima atas kesediannya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampungkan penelitian.
6. Penulis berterima kasih secara istimewa atas segala doa, keikhlasan, cinta, kasih sayang, motivasi dan segala pengorbanannya untuk kesuksesan penulis kepada kedua orang tua saya tercinta, **ayahanda H. Muhammad ArhamdanHj. Harti**, dan Kakekku **H. Hamal**, serta seluruh keluarga besar saya yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas segala dukungan dan doanya selama ini.

7. Teman-teman dari kelas G 2015, teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2015. Penulis ucapkan terima kasih.
8. Teman-teman **Kos Muslimah**, terkhusus kepada Kakanda **Any Surkati S.E**, kakanda **Abdul Raswin S.E** terimah kasih atas kesediannya dalam setiap waktu tanpa mengenal rasa lelah dalam membantu penyusun merampungkan penelitian. Penulis ucapkan terimah kasih.
9. Terimah kasih juga kepada teman-teman **Everlasting Friend (ELF)** yang selalu setia menemani dan mengantar dalam keadaan apapun hingga tahap penyelesaian penelitian.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

**Makassar, 11 Agustus 2019**

**Syarifah Huzaifah**



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Konsep dan Teori.....	9
B. Kerangka Pikir .....	29
C. Fokus Penelitian .....	31
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Teknik Pengabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	56
C. Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matriks Hasil Koordinasi Antar OPD .....	68
Tabel 3.2 Peran dan Fungsi dalam Koordinasi Antar OPD .....	69
Tabel 3.3 Daftar Pedagang Kaki Lima Kecamatan Makassar.....	
Tabel 3.4 Daftar Pedagang Kaki Lima Kecamatan Rappocini.....	



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Bagan Kerangka Pikir.....	29
Tabel 4.1	Struktur Organisasi Disperindag .....	41
Tabel 4.2	Struktur Organisasi Satpol PP Kota Makassar .....	45
Tabel 4.3	Struktur Organisasi Kecamatan Makassar .....	50
Tabel 4.4	Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini .....	52
Bagan 4.5	Bagan Koordinasi antar OPD Dalam Pembinaan PK5 .....	55



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan kota keramaian di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, dengan demikian kota makasar dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Makassar salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Makasar. Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat,berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan pula karena umumnya orang-orang yang masuk ke kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, Akibatnya banyak pengangguran yang tidak memiliki kemampuan ditambah lagi sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi sehingga pilihan satu-satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan sebagai mana tersebut di atas, salah satunya adalah dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima.

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern.

Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa : Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Makassar, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Mereka berjualan di trotoar jalan, di taman-taman kota, di jembatan penyebrangan, bahkan dibadan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang ditengarai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas ataupun merusak keindahan kota.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan nilai positif berupa memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang berkembang, harga yang bersaing mengingat mereka tidak dibebani pajak, dan ada sebagian masyarakat kita lebih senang berbelanja di PKL mengingat faktor kemudahan dan barang yang relatif lebih murah.

Koordinasi antar organisasi/lembaga pada saat ini sangat berperan penting dalam sebuah organisasi untuk dapat tercapainya produktifitas, efisiensi, dan efektifitas, dari setiap kegiatan perlu diadakan antar organisasi terkait bahkan perlu sebuah tim pekerja (*Team Work*) yang lebih stratejik untuk melaksanakan kegiatan . Konsep koordinasi diartikan sebagai suatu bentuk menyatukan kegiatan dan unit kerja suatu instansi atau organisasi, hingga organisasi dapat bekerja sama dan bergerak menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan untuk melaksanakan tugas guna untuk mencapai tujuan organisasi.

kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama Negara dalam mewujudkannya, diperlukan mekanisme dalam kebijakan publik yang dibuat. Dalam mewujudkan kesejahteraan, permasalahan yang timbul menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara kebijakan publik Pemerintah sebagai wadah penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat luas harus bertanggung jawab dan terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima demi peningkatan pelayanan publik. Perbaikan pelayanan publik menjadi suatu bentuk pekerjaan besar Pemerintah Indonesia semenjak gerakan reformasi telah berhasil menggusur rezim orde baru banyak perubahan yang telah dilakukan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman dan penataan pedagang kaki lima dan Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang prosedur kontrol pedagang kaki lima di Kota Makassar. Daerah perkotaan adalah tempat permukiman penduduk yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Di suatu sisi kebutuhan yang semakin tinggi, penduduk sangat

memerlukan ruang untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial hingga menyebabkan semakin banyak yang menjadi ruang untuk mendukung kegiatan sector informal.

Yunus Muhammad (2017) Karakteristik sektor informal bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan memiliki usaha sendiri, modal dari individu itu sendiri atau meminjam dari sanak family (keluarga), sehingga banyak penduduk berlomba-lomba dalam membangun usaha seperti ini karena tipe usaha ini tidak terlalu memakan modal dan peralatan yang banyak untuk membangun usaha seperti ini kemudian mudah dijadikan lapangan kerja untuk masyarakat yang tergolong dalam ekonomi rendah yang banyak ditemui di negara kita terutama pada Kota besar. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor yang ada. Faktor utama yaitu sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan berbagai persyaratan seperti pendidikan yang tinggi dan tingkat keterampilan, modal kerja, maupun sarana yang digunakan semuanya mudah untuk didapatkan oleh anggota masyarakat atau yang tergolong dalam tingkat pengangguran dapat terlibat didalamnya. Salah satu sektor yang menjadi perhatian besar Pemerintah Sulawesi Selatan yaitu sektor tenaga kerja yang bersifat informal. Sektor kerja informal beroperasi pada keramaian Kota Makassar.

Koordinasi antar organisasi adalah proses perpaduan sasaran-sasaran kegiatan dan unit yang terpisah dalam organisasi untuk mencapai tujuan koordinasi antar organisasi secara efisien. Fungsi koordinasi sangat penting dalam penelitian Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Koordinasi antar instansi sebagai satu kesatuan yang bulat dan saling berhubungan dan saling



menunjang untuk mencapai tujuan. Koordinasi antar organisasi adalah usaha yang penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam mewujudkan tujuan secara optimal. Tanpa koordinasi antar organisasi, tujuan yang akan dicapai akan sulit dan keteraturan kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan pun tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan data yang ada jumlah pedagang kaki lima di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018, adapun jumlah peningkatan pedagang kaki lima yaitu : pada tahun 2016 pedagang kaki lima berjumlah 3.752 kemudian pada tahun 2017 jumlah pedagang kaki lima bertambah menjadi 3.951 dan pada tahun 2018 pedagang kaki lima semakin bertambah pesat yaitu sebanyak 4.443 (Sumber: PD Pasar Makassar Raya) Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pelaku ekonomi sektor informal dalam kegiatan perekonomian kota. Pesatnya laju pertumbuhan perkotaan terutama di sebabkan oleh arus urbanisasi dari pedesaan, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diikuti oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai kegiatan di masyarakat perkotaan. Daya tarik perkotaan selalu terbayang akan tersedianya lapangan kerja bagi pendatang untuk meningkatkan pendapatannya padahal mereka tidak memiliki keahlian khusus, sehingga kecenderungan usaha mereka adalah dibidang sektor informal yaitu sebagai Pedagang Kaki Lima.

Di Daerah Sulawesi Selatan tepatnya Kota Makassar terdapat berbagai permasalahan setelah dilakukan observasi awal dalam koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang dimana instansi yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Camat, Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP). Tugas dari masing-masing instansi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan sosialisasi/pembinaan kepada pedagang kaki lima kemudian Satpol PP yang bertugas menertibkan Pedagang kaki lima yang berkeliaran di jalanan dan Camat sebagai penerima laporan mengenai pedagang kaki lima yang mengganggu keindahan Kota yang kemudian melakukan koordinasi dengan Satpol PP dengan cara menertibkan para pedagang kaki lima.

Masalah yang terjadi dalam proses koordinasi adalah Satpol PP dianggap kurang efisien dalam menertibkan pedagang kaki lima padahal pada kenyataannya para Satpol PP sering mengadakan Patroli guna untuk menertibkan pedagang kaki lima yang mengganggu arus lalu lintas tetapi memang yang pada dasarnya pedagang kaki lima inilah yang kian membangkan dalam proses penertibannya karena sering dilakukan proses penertiban tetapi setelah petugas meninggalkan tempat maka para pedagang kaki lima berlomba-lomba kembali menggelar dagangannya atau bahkan para pedagang kaki lima berpindah tempat untuk ditempati berjualan yang dianggapnya layak untuk ditempati berjualan. Terkait mengenai pengusuran pedagang kaki lima yang membuat pedagang kaki lima resah dengan pengusuran mereka dikarenakan sulit untuk mendapatkan penghasilan yang sama di tempat yang baru. pemerintah yang menyediakan lahan namun menimbulkan dampak baru bagi para pedagang pedagang kaki lima yang telah digusur olehnya. Fenomena inilah yang menarik minat saya untuk menyelami lebih dalam untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar instansi dalam pembinaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan penelitian tentang Model Demokratis dan Kebijakan Publik akuntabilitas studi kasus Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. Dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan akuntabilitas kebijakan demokratis melalui tanggapan dan harapan terhadap implementasi Pedagang Kaki Lima Kebijakan pemberdayaan di kota makassar. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan Pedagang Kaki Lima tidak terpenuhi melalui pemberdayaan vendor kebijakan. Ini disebabkan oleh ketidakhadiran forum pertanggung jawaban sebagai tempat kebersamaan semua pemangku kepentingan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (R.Kasmad, 2015).

Fokus penelitian ini mencoba melihat koordinasi dengan tiga aspek yaitu : Kesatuan Tindakan, Komunikasi, dan Pembagian Kerja menurut Hasibuan (2006) dengan aspek koordinasi maka, penelitian ini mengangkat judul

“Koordinasi Antar Instansi Dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek kesatuan tindakan?
2. Bagaimana Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek komunikasi?

3. Bagaimana Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek pembagian kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek kesatuan tindakan.
2. Untuk mengetahui Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek komunikasi.
3. Untuk mengetahui Koordinasi antar Instansi dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dari segi aspek pembagian kerja.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap bidang ilmu organisasi publik.
  - b. Memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan untuk para peneliti selanjutnya terhadap masalah masalah koordinasi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sumber informasi bagi instansi terkait dalam melaksanakan koordinasi untuk Pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar.
  - b. Dapat menjadi acuan penyelenggaraan koordinasi antar instansi pemerintah secara umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Konsep dan Teori

##### 1. Koordinasi

###### a. Pengertian Koordinasi

Handoko (2005), menyebutkan bahwa koordinasi adalah kegiatan pada satuan yang terpisah (bidang-bidang atau departemen- departemen fungsional) dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Handayani (dalam Tamim, 2002) menyebutkan bahwa koordinasi merupakan usaha menyatukan kegiatan dari satuan kerja/unit organisasi sehingga organisasi bergerak menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan seluruh tugas organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi seharusnya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sampai hingga evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Koordinasi menyangkut semua kelompok, orang, unit organisasi, sumber daya organisasi dan yang bekerja sama dalam setiap organisasi. Jasin (2011) menyebutkan bahwa fungsi koordinasi adalah mengsinkronisasikan dan menyelaraskan kegiatan unit departemen organisasi untuk mencapai hasil akhir yang sama. Tanpa koordinasi, terjadi pemborosan waktu, daya upaya dan uang sangat banyak untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Koordinasi yang baik dimulai dari

sikap pegawai, saling percaya dan integrasi kegiatan tetap dan terus menerus dari seluruh anggota manajemen dan angkatan kerja, moral yang tinggi dan semangat kelompok yang baik. Fungsi koordinasi akan tercapai bila didukung oleh seluruh anggota dalam suatu organisasi, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dari koordinasi adalah untuk mengifisienkan kinerja setiap komponen dalam organisasi untuk mencapai hasil yang maksimal dari tujuan organisasi.

Koordinasi diperlukan dalam pekerjaan tim untuk menggerakkan dan mengimbangi tim dengan memberikan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing anggota dan menjaga agar kegiatan dilaksanakan dengan keselarasan. Menurut MC Farland yang dikutip oleh Handayani (2004) bahwa koordinasi merupakan proses dimana pemimpin menjamin kesatuan tindakan bawahannya dalam mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur dalam pencapaian tujuan bersama. Dari beberapa pandangan tersebut jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup organisasi pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat diperlukan adanya keterpaduan kerja yang membutuhkan koordinasi termasuk dalam hal ini adalah Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar.

Dalam sebuah organisasi Pimpinan perlu melakukan proses koordinasi kepada anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas. Ndraha (2011:290), berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi yaitu kewenangan untuk menyelaraskan, menyeimbangkan

dan menggerakkan kegiatan yang spesifik atau berbeda agar semuanya mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan untuk mengefektifkan pembagian kerja dan mengurangi dampak negatif spesialisasi. Dengan adanya pembagian kerja, penyampaian informasi yang jelas dan pengkomunikasian yang tepat dari manajer kepada bawahan maka setiap bawahan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh manajer. Tanpa koordinasi, setiap pekerjaan karyawan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85), menyebutkan bahwa: “Koordinasi merupakan kegiatan mengintegrasikan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Handyaningrat (2002:54), berpendapat bahwa koordinasi yaitu menggerakkan dan mengimbangi tim dengan memberikan kegiatan dan lokasi pekerjaan yang cocok kepada para bawahan. Menurut Terry dalam buku Hasibuan (2006: 85), koordinasi adalah usaha yang sinkron dalam menyediakan jumlah waktu yang tepat, dan mengarahkan keteraturan pelaksanaan dalam menghasilkan kesatuan tindakan dan harmonis pada sasaran yang telah ditetapkan. koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

- 1) Kesatuan tindakan dan saling bekerja sama
- 2) Harus menghargai satu sama lain

Dengan ini koordinasi sebagai usaha penyesuaian kerja antar anggota organisasi hingga tidak terjadi kesimpang siuran dan tumpang tindih, hal ini berarti pekerjaan dapat terselesaikan seefisien mungkin. Jadi koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan pembagian kerja agar mempunyai keselarasan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi. Kekuatan sebuah organisasi tergantung kepada kemampuannya dalam menyusun berbagai sumber dayanya untuk mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah tindakan pimpinan dalam mengusahakan adanya penyelarasan antara pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada bawahan atau bagian yang satu dengan yang lain.

b. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan yaitu kewajiban pimpinan dalam memperoleh koordinasi yang baik dalam mengatur jadwal waktu kegiatan dan mengatur setiap kegiatan individu sehingga adanya keselarasan dalam mencapai hasil sebagaimana yang dimaksudkan bahwa kesatuan tindakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Koordinasi memerlukan kesadaran tiap anggota organisasi agar saling menyesuaikan diri dan tugas yang telah diberikan



kepada anggota organisasi yang lain agar anggota organisasi yang lainnya tidak berjalan secara individu atau bergerak sendiri-sendiri.

## 2. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Komunikasi berasal dari kata *communication*, yaitu dalam bahasa latin memiliki arti berpartisipasi atau memberitahukan. Dalam organisasi komunikasi sangat berperan penting karena dengan komunikasi, pimpinan menyampaikan informasi atau tugas kepada bawahannya melalui komunikasi. Dalam koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena dengan komunikasi sebagian besar jumlah anggota dalam organisasi melakukan proses koordinasi dan ditentukan melalui adanya komunikasi.

## 3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan perincian tugas dan pekerjaan kepada tiap individu dalam organisasi agar setiap anggota organisasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh manajer. Secara teoritis tujuan dalam organisasi yaitu untuk mencapai tujuan atau target bersama dimana individu dalam suatu organisasi tidak bisa mencapai tujuan secara perseorangan. Dua kelompok organisasi yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil yang baik daripada dilakukan perseorangan. Oleh karena itu di dalam sebuah organisasi, tiang dasarnya yaitu prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja maksudnya yaitu jika organisasi

diharapkan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam usaha mencapai tujuan, maka perlu dilakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja diharapkan dapat berfungsi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

c. Tipe-tipe Koordinasi

Tipe koordinasi dibagi menjadi dua yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. organisasi mempunyai tipe koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas agar pencapaian tujuan terlaksana dengan baik. Kedua tipe ini biasanya terdapat dalam organisasi (Hasibuan 2006:86).

Makna tipe koordinasi ini dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi vertikal merupakan kegiatan pengarahan dan penyatuan yang dilakukan atasan terhadap kegiatan kesatuan atau unit kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi secara langsung seluruh anggota yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sehingga koordinasi vertikal secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit untuk diatur.
- 2) Koordinasi horizontal merupakan pengkoordinasikan tindakan atau kegiatan pengarahan dan penyatuan kegiatan dalam organisasi atau instansi yang sederajat. Sehingga koordinasi horizontal dibagi menjadi dua yaitu *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* merupakan suatu koordinasi dalam mewujudkan, menyatukan tindakan, mengarahkan, dan menciptakan kedisiplinan antara unit satu dengan

yang lainnya pada unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar instansi beserta unit-unit yang berbeda fungsinya, tapi instansi yang satu dengan yang lainnya saling bergantung yang levelnya setingkat. Koordinasi horizontal ini sulit dilakukan karena koordinator tidak bisa memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur karena kedudukannya setara.

#### d. Tujuan koordinasi

Beberapa pengertian diatas, dapat dimengerti bahwa koordinasi adalah suatu hal yang harus ada bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Koordinasi sangat berperan penting dalam mengarahkan bawahan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan perusahaan.

Hasibuan (2006:86) mengemukakan bahwa koordinasi sangat berperan penting dalam organisasi, yaitu :

1. Agar orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan.
2. Agar mencegah terjadinya percekocokan, kekacauan dan kekosongan pekerjaan.
3. Agar semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.
4. Agar sarana dan prasarana digunakan dalam pencapaian tujuan

#### e. Sifat-sifat Koordinasi

Sifat-sifat koordinasi yaitu :

1. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam pencapaian tujuan.
2. Koordinasi bersifat statis bukan dinamis.
3. Koordinasi meninjau pekerjaan secara keseluruhan.

Asas koordinasi merupakan asas skala tingkatan (hierarki) yang berarti koordinasi dilakukan berdasarkan jenjang kekuasaan dan tanggung jawab disesuaikan dengan jenjang yang berbeda dengan yang lain, ini merupakan kekuasaan mengkoordinasi yang harus bekerja melalui proses formal.

Dalam berbagai literature dijumpai berbagai definisi tentang koordinasi. Mooney dan Relley (dalam Handayangdingrat, 2002:88-89) menjelaskan koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Senada dengan pengertian tersebut (Sutarto, 2002:127) menjelaskan bahwa koordinasi adalah proses dimana pimpinan mengembangkan pola yang teratur dalam usaha kelompok diantara bawahannya dan dalam usaha tujuan bersama.

Penekanan pada kesatuan tindakan dan peranan pimpinan dalam koordinasi nampak memperoleh perhatian dari para ahli yaitu dengan menitik beratkan proses yang mengatur tata hubungan yang menjadi satu kebulatan yang terintegrasi. Keberhasilan koordinasi adalah tanggung jawab dari pimpinan dan koordinasi itu merupakan pusat kekuatan. Kebutuhan akan koordinasi berbeda untuk suatu organisasi dengan yang lain dan kebutuhan itu tergantung pada sifat tugas yang dijalankan dan kebutuhan

komunikasi serta ketergantungan dari berbagai satuan dalam menjalankan pekerjaan mereka. Semakin tergantung pekerjaan mereka dengan kegiatan maka semakin perlu koordinasi, kalau tidak maka pelaksanaan akan semakin efisien.

Bukan hanya kerjasama dan kesatuan tindakan semata tetapi juga menyangkut sinkronisasi, integrasi, penentuan waktu kegiatan dan pengarahan yang menghasilkan penyelarasan, keseluruhan kegiatan ini menjadi obyek sekaligus memberikan andil bagi pencapaian efektivitas dan efisien sebesar-besarnya.

Chenenema (dalam Kamil, 2003) menyatakan bahwa ada lima faktor yang menjadi penyebab mengapa koordinasi dibutuhkan dalam pembangunan daerah. Pertama : untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas dan untuk mengurangi terjadinya konflik tujuan diantaranya berbagai unit pemerintah yang tumbuh dengan cepat. Ketiga : menjamin kesatuan tindakan/kebijaksanaan pemerintah pada tingkat operasional. Keempat: memantapkan kaitan yang efektif diantara unit-unit pemerintahan sedemikian rupa sehingga dapat saling membantu satu sama lainnya. Kelima : mengurangi gejala timbulnya tumpang tindih baik dalam fungsional maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

## **2. Manajemen Publik**

(Ramto, 2001) *Public Management* (Manajemen Pemerintahan) merupakan faktor utama administrasi publik dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan sarana dan prasarana termasuk organisasi serta sumber daya

dan sumber dana yang tersedia. Manajemen pemerintahan tidak lain merupakan upaya dalam suatu organisasi. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan warga negara dan masyarakat (Kristiadi, 2004). Pemerintahan merupakan sebagai kegiatan lembaga publik dalam pencapaian tujuan negara. Terminologi manajemen sangat berhubungan erat dengan usaha dalam pencapaian tujuan tertentu dengan menggunakan sumber yang tersedia di dalam organisasi yang seefisien mungkin. Dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan memiliki arti sebagai bentuk kegiatan atau usaha dalam mencapai tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai oleh negara. (Suradinata, 2009).

Sistem pemerintahan menjadi tolak ukur pelayanan warga negara dalam mendapatkan jaminan atas hak-haknya maka, peningkatan kualitas pelayanan akan semakin penting. Davidow (dalam Lovelock, 2012) menyebutkan bahwa pelayanan adalah hal-hal yang jika diterapkan terhadap sesuatu produk akan meningkat daya atau nilai terhadap pelanggan. Pelayanan yang baik memerlukan instruktur pelayanan baik pula, hal terpenting adalah membuat orang-orang di dalam organisasi berorientasi pada kualitas. Suradinata (2007) Manajemen pemerintahan sebagai proses dalam mencapai tujuan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur negara (pemerintah). Di dalam kehidupan masyarakat harus memperhatikan prinsip umum manajerial pemerintah di bawah ini :

1. Adanya pembagian kerja
2. Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas
3. Mekanisme kerja yang jelas

#### 4. Etos kerja yang tinggi

Norman (2008) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan proses sosial dan manajemen merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses-proses sosial. Konsumen masa depan menginginkan proses lebih cepat, praktis, dan profesionalisme. Tidak hanya mengikuti kemajuan teknologi tetapi hendaknya lebih banyak ditujukan sebagai jawaban atas permintaan konsumen yang menginginkan informasi yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat. *Service quality* (kualitas pelayanan) hampir menjadi faktor yang mendalam untuk menjaga keberlangsungan suatu organisasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Perwujudan kepuasan pengguna jasa publik sangat penting, dengan memberikan pelayanan yang prima dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik.

#### 3. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak atau tidak bergerak dan menggunakan lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang sifatnya sementara atau tidak menetap. Menurut (Sugiharsono dkk,2000:45) Pedagang merupakan perantara yang berkegiatan membeli barang dan kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atas kreasi sendiri dengan konsumen untuk menjualnya. Pedagang Kaki Lima biasa disingkat PKL merupakan istilah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering disebut karena jumlah kaki pedagangnya adalah lima. Lima kaki tersebut yaitu dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sesungguhnya yaitu dua atau tiga roda dan satu kaki).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kaki lima yaitu lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan yang lain, arti kedua yaitu lantai (tangga) di depan pintu atau di tepi jalan. Dahulu namanya yaitu pedagang emperan jalan, sekarang berubah menjadi pedagang kaki lima, tetapi seiring dengan perkembangan zaman istilah pedagang kaki lima memiliki arti yang lebih luas karena digunakan pula untuk menyebut para pedagang jalanan pada umumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Pedagang Kaki Lima pasal 2 ayat 2 Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Makassar. Kepala Daerah menentukan atau mengatur tempat pelataran yang boleh digunakan para pedagang kaki lima secara individu maupun kelompok sebagai lahan untuk berdagang atau usaha. Kemudian diperjelas Pada Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa, pedagang kaki lima tidak diperbolehkan menempati bahu jalan dan trotoar.

Kemudian dalam Perda ini ditetapkan pula sejumlah wilayah atau jalan besar dari pkL yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan lahan berdagang yaitu: sepanjang Jalan Jendral Sudirman, Jalan Gunung Bawakaraeng, Jalan Hertasning, Jalan Samratulangi A.P. Petarani, dan sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Ayat 2 Pasal 2 Peraturan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002, tentang sejumlah pelataran yang tidak dapat digunakan pada pukul 05.00 sampai



jam 17.00 wita, di antaranya : sepanjang Jalan Nusantara, Jalan Ujung Pandang, Jalan Riburane, Jalan Ahmad Yani, Masjid Raya, Jalan Gunung Bulusaraung, dan sepanjang Jalan Sulawesi. Menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun di dalam Perda K3 (keindahan, kebersihan, dan ketertiban) terdapat larangan pedagang kaki lima untuk berjualan di , jalur hijau, trotoar, serta tempat yang bukan peruntukannya.

Pedagang kaki lima adalah usaha yang menggunakan modal yang terbilang sedikit hingga memproduksi barang jualan sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kebanyakan konsumen ini terdapat dari kalangan ekonomi rendah. Usahanya dilakukan pada tempat-tempat ramai dan dianggap strategis untuk lingkungan yang informal. Meski kehadiran para pedagang kaki lima sering dianggap ilegal, tetapi peranan pedagang kaki lima dalam membantu sektor formal sangat besar, termasuk dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), karakteristik sektor informal adalah sebagai berikut:

1. Mandiri

Umumnya pendirian usaha dilakukan sendiri oleh pemilik usaha tanpa ada bantuan dari orang lain seperti buruh/pekerja

2. Modal

Modal yang dipakai dalam melakukan usaha berasal dari milik sendiri.

### 3. Waktu

Rata-rata waktu kerja sektor informal dalam sehari, paling lama adalah 9 jam.

### 4. Pinjaman

Dalam menjalankan usaha mayoritas, mereka tidak memanfaatkan bantuan pinjaman pemerintah ataupun bank lokal. Tetapi mencari pinjaman lainnya, yang berasal dari keluarga atau kerabat terdekat.

Kegiatan ekonomi informal perkotaan membawa dampak permasalahan bagi perkotaan yaitu :

- a. Terbaikannya kebersihan lokasi sektor informal
- b. Adanya eksploitasi anak usia sekolah
- c. Penyalahgunaan penggunaan ruang publik
- d. Rentannya pemerasan karena tidak adanya perlindungan hukum
- e. Munculnya pungutan liar yang seharusnya dibayarkan kepada pihak tertentu

Keuntungan yang muncul atas kehadiran pedagang kaki lima yaitu mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran di wilayah perkotaan. Sedangkan masalah yang muncul atas kehadiran pedagang kaki lima bagi perkotaan yaitu mengganggu kegiatan perkotaan sehingga menimbulkan kesemrawutan bahkan sering terjadi kemacetan. Tidak tertatanya pedagang kaki lima dengan baik karena tidak tersentuh oleh pemerintah. Penyediaan barang yang terbilang murah untuk masyarakat sulit diprediksi pertumbuhannya hingga mengakibatkan sulit untuk

ditata dan menjadi cikal bakal sektor formal sehingga menimbulkan dampak dari keberadaan pedagang kaki lima, yaitu :

- 1) Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan sampah setiap hari yang merusak keindahan kota.
- 2) Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat.
- 3) Menimbulkan kesan kumuh.
- 4) Menurunkan keindahan fisik lokasi tertentu karena tidak tertata.
- 5) Penggunaan trotoar tidak sesuai fungsi peruntukannya.
- 6) Terhalangnya lahan parkir karena digunakan sebagai lokasi usaha berdagang.

Pada umumnya para pedagang kaki lima tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, modal yang digunakan diperoleh dari pinjaman sanak family atau kerabat terdekat. Pandangan pemerintah kepada sektor informal bukan sebagai penggerak ekonomi bahkan sebagai ancaman yang ditertibkan sehingga terjadi kesalahan pemahaman dalam memandang sektor informal sehingga pendekatan yang diterapkan tidak menyentuh akar permasalahan (Amin Adam : 2011).

Untuk itu dalam pertumbuhan sektor informal diperlukan adanya dukungan dari pemerintah dan melindungi dari ancaman monopoli perusahaan besar yang sifatnya formal dengan cara mengatur serta menjamin perkembangan mekanisme pasar .Oleh sebab itu, pemerintah mempertimbangkan lagi keberadaan sektor informal, jika keberadaan sektor informal mampu diberdayakan dengan

baik, bisa menjadi potensi daerah dalam mengurangi angka pengangguran. Upaya dalam mewujudkan pemberdayaan para pedagang kaki lima yaitu :

- a. Memberikan kebijakan yang melindungi keberadaan PKL,
- b. Memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lokasi berjualan PKL,
- c. Merelokasi tempat-tempat berjualan para PKL,
- d. Melakukan penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengembangkan keahlian para PKL.

Faktor yang Menyebabkan Pedagang Memilih Lokasi untuk Usaha Tujuan utama dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual barang dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Umumnya kegiatan perdagangan dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Begitupun dengan kegiatan perdagangan pedagang kaki lima yang menjual dagangan di lokasi yang ramai, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sasaran penjualan produk pedagang kaki lima ditujukan untuk masyarakat yang tergolong dalam ekonomi rendah, sehingga harga produk yang ditawarkan terbilang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di toko. beberapa faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :

1. Faktor Keramaian Lokasi.
2. Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.
3. Kenyamanan dan keamanan

4. Lokasi dagang pedagang kaki lima yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau gangguan dari preman.

Maraknya pedagang kaki lima berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata dan menimbulkan kesemrawutan sehingga mengganggu kebersihan serta keindahan kota. Lokasi berdagang sembarangan dan parkir yang tidak teratur oleh para konsumen pedagang kaki lima hingga memakai bahu jalan sangat mengganggu ketertiban lalu lintas baik untuk para pejalan kaki maupun pengendara. Selain itu masalah limbah atau sampah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima menjadi penyebab kesulitan penataan kota apalagi sejauh ini para pedagang kaki lima belum menyadari betapa pentingnya menjaga keindahan serta kebersihan dalam perwujudan penataan kota. Masalah kemacetan bukan hanya permasalahan sektoral lagi, melainkan menjadi bagian dari berbagai permasalahan kota yang saling terkait satu sama lain.

Faktor lain yang dibenahi yaitu lemahnya kesiapan lembaga dan tumpang tindihnya masing-masing instansi. Tata ruang kota menjadi acuan dalam pembangunan sistem transportasi perkotaan yang jarang dijadikan sebagai bahan rujukan bersama. Kepemimpinan dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Biaya pembangunan transportasi perkotaan yang dikorupsi sudah jamak dilakukan di negara ini sehingga kuantitas dan kualitasnya jauh dari dengan yang diharapkan. Penyusunan rencana kota kurang aspiratif dan tidak terlalu melibatkan masyarakat sehingga

kota kehilangan visi pengembangannya akibatnya, kota sangat rentan terhadap tekanan kepentingan modal.

Kata kunci dalam pembangunan sistem transportasi perkotaan yang baik hingga tidak menimbulkan masalah kemacetan yaitu apakah pembangun tersebut akan membantu dalam memecahkan masalah ekonomi masyarakat atau hanya menambah beban baru dengan cara meminggirkan mereka secara paksa. Harapan kita bersama semoga kelemahan tersebut tidak menjadi celah dalam memunculkan pola tindak pragmatis guna kepentingan individu, kelompok atau atas nama kepentingan umum. Upaya penggusuran atau menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima sesungguhnya adalah fenomena lama yang juga dialami beberapa kota-kota besar di Indonesia.

Sejak terjadinya krisis ekonomi, pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan antar daerah mengalami hambatan dan keterbatasan dalam ketersediaan modal, pemanfaatan sumber daya alam, kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia. Seiring perkembangan zaman, adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi daerah perkotaan dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja hingga banyak masyarakat ekonomi bawah memutuskan mengambil tipe usaha sebagai pedagang kaki lima.

Berkembangnya pedagang kaki lima disebabkan oleh gagalnya pemerintah mengatasi krisis ekonomi yang diderita oleh masyarakat terlihat dari lambatnya pertumbuhan ekonomi yang hingga akhirnya menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih

700.1 juta orang sedang menganggur. Yang menjadi perhatian kita adalah seandainya pemerintah memberikan komitmen yang kuat dalam mensejahterakan masyarakatnya dimana pemerintah menyiapkan dana khusus atau lahan khusus sebagai jaminan pedagang kaki lima yang terkena gusur untuk memulai usaha baru ditempat lain untuk ditempati berdagang oleh para pedagang kaki lima. Mengingat bahwa pedagang kaki lima yang digusur biasanya tanpa ada ganti rugi karena dianggap ilegal. Bagaimanapun juga pedagang kaki lima juga merupakan warga negara yang harus dilindungi hak dan kewajibannya ,bebas berkarya, hak untuk hidup berkumpul dan berserikat.

Jadi yang terkena dampak dari adanya PKL yaitu para masyarakat pengguna jalan dan mengurangi keindahan tatanan jalan perkotaan. Pedagang kaki lima adalah kegiatan sector marginal (kecilkecilan) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak tersentuh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga kegiatannya sering dikatakan liar.
- b. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimanya.
- c. Modal peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil atau produksi dari diri sendiri
- d. Pendapatan rendah dan tak menentu
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan keterkaitan dengan usaha yang lain

- f. Umumnya dilakukan untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mahsyar, tahun 2014 dengan judul Model koordinasi Antar Instansi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui model koordinasi yang tepat dan faktor penyebab kemacetan lalu lintas dalam penganggulangan kemacetan lalu lintas. Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Mawar Rizki Fauziyyah dkk, tahun 2017 yang berjudul Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Wates Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi penataan pedagang kaki lima Kabupaten Kulon Progo dan mengetahui hambatan yang muncul dan cara mengatasi hambatan koordinasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R.Kasmad pada tahun 2015 yang berjudul Model Demokratis Akuntabilitas Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar yang bertujuan untuk memverifikasi model jaringan peningkatan kapasitas organisasi di Indonesia, implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Makassar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah program yang akan di teliti, sedangkan persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui tentang koordinasi antar instansi pemerintah terkhusus dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar.



Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek koordinasi antar instansi dalam pembinaan pkl di Kota Makassar.

## **B. Kerangka Pikir**

Koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menyasikan, menggerakkan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk memberikan penyampaian yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, mengurangi dampak negatif dan mengefektifkan pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja kepada bawahan oleh manajer maka setiap anggota organisasi (bawahan) akan mengerjakan pekerjaannya sesuai yang diperintahkan.

Tanpa adanya koordinasi, pekerjaan individu atau karyawan tidak akan tercapai secara efisien dan efektif. Dengan adanya koordinasi kinerja antar organisasi/pemerintah maka tujuan yang akan dicapai akan terlaksana dengan baik karena terciptanya bentuk kerja sama dan sinergitas antara kedua pihak atau instansi yang terkait. Fokus penelitian ini mencoba melihat koordinasi Horizontal dengan empat aspek yaitu : Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin menurut Hasibuan (2006) adapun bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Bagan Kerangka Pikir**

Koordinasi Antar Instansi  
dalam Pembinaan  
Pedagang Kaki Lima di  
Kota Makassar

Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan  
Kota Makassar

Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota  
Makassar

Kantor Kecamatan

Aspek Koordinasi

1. Kesatuan Tindakan
2. Komunikasi
3. Pembagian Kerja

Terciptanya Ketertiban  
Pedagang Pedagang Kaki  
Lima



### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat berperan penting dalam proses penelitian. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Fokus dari penelitian ini adalah koordinasi horizontal dengan melihat tiga aspek dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar.

### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Koordinasi yaitu proses penyelarasan atau usaha kerja sama antar instansi atau pemerintah dalam proses pelaksanaan tugas atau kegiatan sehingga dapat saling membantu dan saling melengkapi dalam pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.
2. Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi. Koordinasi memerlukan kesadaran tiap anggota organisasi agar saling menyesuaikan diri dan tugas yang telah diberikan kepada anggota organisasi yang lain agar anggota organisasi yang lainnya tidak berjalan secara individu atau bergerak sendiri-sendiri.
3. Komunikasi dalam organisasi sangat berperan penting karena dengan komunikasi pimpinan menyampaikan informasi atau tugas kepada bawahanannya melalui komunikasi. Dalam koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena dengan komunikasi sebagian besar jumlah anggota organisasi melakukan proses koordinasi dan ditentukan melalui adanya komunikasi.

4. Pembagian kerja merupakan proses perincian tugas dan pekerjaan kepada tiap individu dalam organisasi agar setiap anggota organisasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan.
5. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak atau tidak bergerak menggunakan fasilitas sosial, prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang sifatnya sementara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu selama kurang lebih 2 bulan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian yaitu pada Bulan Juni sampai Bulan Agustus dan bertempat di Kota Makassar. Pemilihan Kota Makassar karena kota makassar memiliki penduduk yang banyak sehingga menjadi sasaran para pedagang kaki lima untuk berdagang.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan tentang koordinasi antar instansi dalam pembinaan pedagang kaki lima.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini yaitu Tipe penelitian studi kasus untuk menggali lebih dalam pada aspek koordinasi antar instansi dalam pembinaan pedagang kaki lima.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data atau informasi yang diambil langsung dari lokasi penelitian melalui informan dengan melakukan wawancara langsung dengan orang atau instansi yang telah dipilih dan dianggap bisa

menjadi informan dengan memberikan pertanyaan yang mengarah kepada pendalaman informasi.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk dokumen atau artikel yang bersifat tertulis. Adapun data yang berbentuk dokumen atau artikel yang berhasil dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari internet, buku, koran dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data dalam proses penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan sengaja informan yang terlibat langsung dilapangan yang akan memberikan informasi. Berdasarkan pertimbangan di mana terlebih dahulu peneliti menetapkan siapa saja yang menjadi informannya dan kemudian memilih informan yang memiliki kapasitas dan memahami masalah yang sedang dipersoalkan agar dapat memberikan informasi atau data yang akurat sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Komandan regu pada Satuan Polisi Pamong Praja
3. Camat Rappocini
4. Camat Makassar
5. Kepala bagian trantib kecamatan
6. Pedagang Kaki Lima

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 1. Observasi ( pengamatan )

Metode pengamatan ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Dengan observasi ini dilakukan secara terbuka atau langsung, cara ini mampu mendapatkan informasi yang nyata dan menggali kejujuran informan dalam memberikan informasi yang benar dan nyata.

#### 2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung antara peneliti dan informan yang mendalam untuk mendapatkan informasi. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku dan pulpen agar proses wawancara yang secara mendalam bisa berlangsung dengan baik dan lancar.

#### 3. Dokumentasi

Data-data yang didapatkan peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber media, dan yang tersimpan dalam internet atau website.

### **F. Teknik Analisi Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah di bawah ini :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum atau memilih hal-hal pokok dan penting, sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas.

### 2. Sajian Data

Dalam penelitian kualitatif, dalam penyajian data selain data dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar, skema, atau jaringan yang berkaitan dengan kegiatan dan tabel sebagai pendukung narasi.

## G. Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diterapkan untuk membuktikan kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi. Menurut Sugiyono (2014) ada tiga macam triangulasi yaitu :

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dengan cara mengecek ulang informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara oleh informan yang satu dengan yang lainnya, membandingkan hasil wawancara dan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.



## 2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk menguji akuratnya sebuah data.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang benar melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Obyek Penelitian

##### 1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Letak Geografis Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 KM<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km<sup>2</sup>.

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Bringkanaya.

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep sebelah timur dengan kabupaten

maros, sebelah selatan dengan kabupaten gowa dan sbelah barat dengan selat makassar.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis, kota makassar memang sangat startegis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi, maupun politik. Dari sisi ekonomi, makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien di bandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan timur indonesia, membuat makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan makassar, otomatis akan sangat berpegaruh terhadap peningkatan kesahteraan masyarakat dikawasan timur indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan timur indonesia. Saat ini kota makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu mamminasata.

## **2. Sejarah singkat kantor perindustrian dan perdangangan**

Sejarah singkat kantor perindustrian dan perdangan kota makassar setelah penerapan otonomi sesuai daerah undang-undang nomor 22 tahun 1999, pembinaan dan pengembangan sektor industri dan perdangangan di kota makassar diintegrasikan antara intansi kantor wilayah departemen perindustrian, kantor wilayah departemen perindustrian, kantor wilayah perdangan dan dinas teknis Pemda Tk. I dan Tk II di provinsi sulawesi selatan melalui dinas perindustrian dan perdangangan berdasarkan peraturan

daerah provinsi sulawesi selatan nomor 15 tahun 2000 tentang dinas daerah provinsi sulawesi selatan. Pada saat itu, dinas perindustrian dan perdagangan kota makassar dipimpin oleh bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretariat kota makassar.

Dengan terbentuknya dinas perindustrian berdasarkan peraturan daerah NO. 5 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah kota makassar nomor 15 tahun 2000 tentang dinas daerah kota makassar telah terjadi perubahan struktur organisasi pada dinas perindustrian dan perdagangan kota makassar. Selanjutnya, berdasarkan peraturan daerah kota makassar nomor 21 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas kota makassar tugas pokok dan fungsi dinas industri dan perdangan telah diintegrasikan kepada dinas perindustrian dan perdagangan kota makassar.

a. Visi dan Misi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Visi

Terwujudnya penyelenggaraan perizinan dan iklim investasi berkelas dunia yang kondusif dan nyaman bagi semua.

2. MISI

Misi kantor dinas perindustrian dan perdagangan kota makassar dimakassar yaitu:

- a) Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal yang transparan akuntabel dan bebas korupsi
- b) Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing investasi.

- c) Modernisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penerapan teknologi informasi.
- d) Meningkatkan kompetensi aparatur PERINDAG melalui sistem reward dan punishment.



b. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Makassar

Lampiran : Peraturan Wali Kota Makassar  
 Nomor : 104 Tahun 2019  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan



**SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**: Abd. Razaq Rasyd, S.Sos (Pangkat. Penata Tk.I, Nip. 19700321 199803 1 007)

**SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN**: Muhammad Ali (Pangkat. Pembina, Nip. 19761123 200611 1 001)

UPTD KULIT: Muchlis, SE, M. Si (Nip. 19670102)  
 UPTD Metreologi Legal: Qamaluddin Achmad, SH, MH (Nip. 19651222 199309 2 001)

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Disperindag

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Perindustrian serta tugas pembantuan

2. Sekretaris

Dibanding dengan posisi lain, sekretaris termasuk karyawan yang memiliki multitugas diantaranya: pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, pengelolaan dan menghimpun penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan menyimpan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.

#### 5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, pembinaan hukum, organanisasi dan tata laksana.

#### 6. Bidang Perindustrian

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian.

#### 7. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kementrologian

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perlindungan konsumen dan kementrologian serta peredaran barang dan jasa.

#### 8. Bidang Pengawasan dan Penindakan pelanggaran perdangan dan perindustrian

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkajian pengawasan dan penindakan pelanggaran perdagangan dan perindustrian.

#### 9. Bidang Perdagangan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang meliputi bina usaha dan distribusi, *mentrology* dan Perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan dan promosi.



#### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi pamong praja didirikan di Jogjakarta pada tanggal 3 Maret 1950 motto praja wibawa, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi satuan polisi pamong praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah detasemen polisi sebagai penjaga keamanan sesuai dengan surat perintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun 1960 dimulai pembentukan kesatuan polisi pamong praja dengan dukungan para petinggi militer /angkatan perang. Dengan tugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum khususnya dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah.

Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Makassar

a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



## b. Tugas dan Fungsi Satpol PP

### 1. Kepala satuan

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan satuan polisi pamong praja.

### 3. Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan

Subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja.

### 4. Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan.

### 5. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

#### 6. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang pembinaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan potensi masyarakat terhadap pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

#### 7. Seksi Kewaspadaan Dini

Seksi kewaspadaan dini mempunyai tugas melakukan pembinaan, pemantauan, pengawas dan pengendalian di bidang kewaspadaan dini.

#### 8. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

Seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat terkait produk hukum daerah.

#### 9. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### 10. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas melakukan peningkatan kemampuan dan ketertiban aparaturnya dalam penanganan ketertiban umum dan ketentraman umum dan ketentraman umum.

#### 11. Seksi Ketertiban Umum

Seksi ketertiban umum mempunyai tugas melakukan pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diseluruh wilayah Kota Makassar.

#### 12. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang penegakan peraturan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penegakan terhadap peraturan daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

#### 13. Seksi penegakan

Seksi penegakan mempunyai tugas melakukan penegakan peraturan Daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota.

#### 14. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi hubungan antar lembaga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja

#### 15. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat.

#### 16. Seksi Data dan Informasi

Seksi data dan informasi mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi satuan perlindungan masyarakat.

#### 17. Seksi Pelatihan dan mobilisasi

Seksi pelatihan dan mobilisasi mempunyai tugas melakukan pelatihan dan mobilisasi datuan perlindungan masyarakat.

#### 18. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. Profil Kecamatan Makassar

Kecamatan makassar adalah salah satu kecamatan dari 15 kecamatan yang ada di kota makassar yang memiliki luas wilayah 2,25 km<sup>2</sup>, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 80.879 jiwa dengan jumlah laki 40.423 jiwa sedangkan perempuan 40.456 jiwa. Dalam wilayah daratan kecamatan Makassar memiliki 15 kelurahan.

#### a. Visi dan Misi

##### 1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Aman Dan Responsif.

##### 2. Misi

- a) Meningkatkan pelayanan prima kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat.
- b) Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat, peran serta dan pembinaan masyarakat.
- c) Mengkordinasikan penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup beragama,

pengordinasian kegiatan intansi pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan adminitrasi kelurahan, serta pembinaan adminitrasi kependudukan.

- d) Mengkordinasikan pemeliharaan prasana umum.
- e) Mendorong peningkatan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan dan kelurahan.

### 3. Sruktur Organisasi Kecamatan Makassar Kota Makassar

Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Makassar



## 5. Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kota Makassar, pemekaran dari kecamatan Tamalate yang dibentuk pada tanggal 07 Januari 1998 tindak lanjut dari persetujuan mendagri No. 138/1242/POUD tanggal 3 Mei 1996 berdasarkan gubernur Sulawesi Selatan tahun 1996, dengan luas wilayah 9.23 KM, kecamatan Rappocini merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian antara permukaan laut terdiri dari 10 kelurahan menurut jaraknya layak masing-masing keseluruhan. Dengan jumlah penduduk sekitar 190.539 jiwa pada tahun 2018 dan adapun lembaga-lembaga milik pemerintah dan swasta yang mendukung kegiatan pemerintahan kecamatan Rappocini.

### a. Visi dan Misi Kecamatan Rappocini

#### 1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima menuju Kecamatan Rappocini yang sejahtera dan nyaman untuk semua.

#### 2. Misi

- a. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja pelayanan
- b. Peningkatan ekonomi masyarakat
- c. Peningkatan kualitas lingkungan masyarakat



Gambar 4.4 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini

## b. Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 133 TAHUN**  
**TENTANG : KEDUDUAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS**  
**DAN FUNSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN**  
**TIPE**

**CAMAT**

**SULYADI PERDANAPUTRA SG, S.STO**  
**19880519 200312 1 003**

**SEKCAM**

**MUH. ARIL SYAHBANI KAHAR, S.IP**  
**19880415 2000701 1 001**

**KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN**

**MOH. SYAMSUAR, S.E**  
**198408002 201407 1 001**

**KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN**

**EVIE EDWISINTHA SISWANTY, SE**  
**19810606 201001 2 029**

**KASI PEMERINTAHKINERJA LURAH & RT/RW**

**SULAEHA HAMZAH, SE**  
**19680925 196003 2 004**

**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESRA**

**HIKMAWATI, ST**  
**19811127 200903 2 002**

**KASI EKBANG & PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI**

**ULFAH DJAMALUDDIN, S,STP, M.Si**  
**19780925 199711 2 001**

**KASI TRANTIB & PENGAKAN PERDA**

**ANDI BINTANG HARIS, SH,MH**  
**19720427 200604 1 009**

**KASI PENGELOLAAN KEBERSIHANPERTAMANAN**

**ABD. HARIS, S.Sos**  
**19611231 198103 1 604**

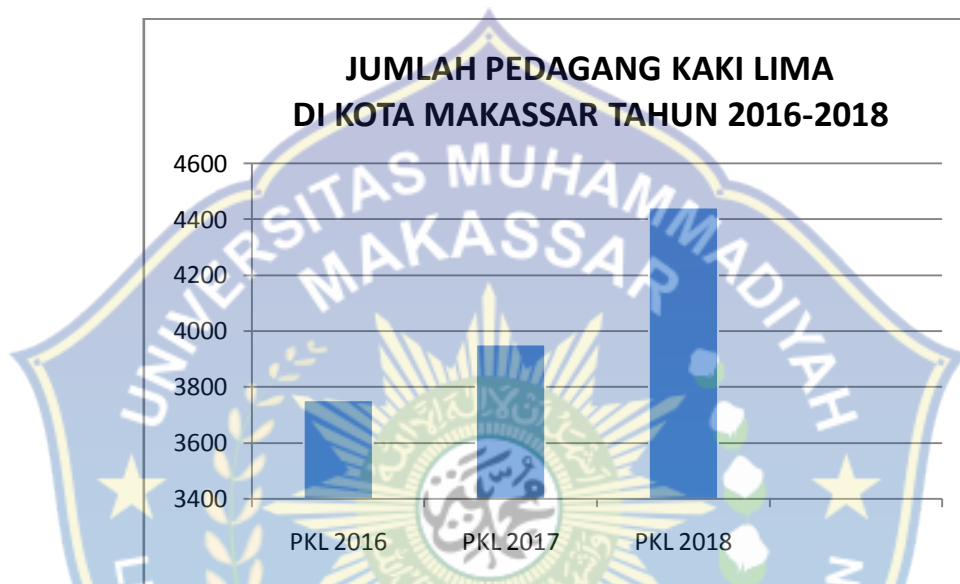
**KELURAHAN**

## 6. Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar

peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Makassar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pembinaan” berasal dari kata “bina” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi. Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing. Berdasarkan pada pengertian pembinaan tersebut di atas, maka pembinaan pedagang kaki lima diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan pedagang kaki lima sehingga pedagang kaki lima dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosial perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga Kota. Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap dan keterampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina. Dalam pembinaan, dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka.

Pembinaan dilakukan oleh OPD mengenai penanganan pedagang kaki lima yang telah diatur oleh pemerintah setempat. Dalam menangani pedagang kaki lima perlu mencari solusi yang baik dan bijaksana karena pemusnahan tanpa memberi jalan keluar dengan memberi tempat yang memenuhi syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekonomi

kerakyatan yang notabene sumber hidup masyarakat bawah. Sektor ini membutuhkan perhatian yang lebih baik lagi dari pihak Pemerintah. Oleh karena itu, jalan yang terbaik untuk menangani sektor ini adalah melalui pembinaan. Di kota Makassar terdapat jumlah pedagang kaki lima seperti di bawah ini.



Sumber: PD Pasar Makassar Raya

Berdasarkan diagram pedagang kaki lima di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pedagang kaki lima tiap tahunnya pada tataran Kota Makassar semakin meningkat pada tahun 2016 sebanyak 3752 yakni 30,89% pedagang, jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2017 sebanyak 3951 yakni 32,53% dan pada tahun 2018 sebanyak 4443 yakni 36,58% pedagang. Dalam penelitian pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar, peneliti memilih dua lokasi penelitian yaitu kecamatan Rappocini dan Kecamatan Makassar yang data pedagang kaki lima nya dapat terlihat pada halaman lampiran.

## B. Hasil Penelitian

Koordinasi dalam pembinaan pedagang kaki lima dikawasan kota makassar terkhusus di Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Satpol PP Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini dalam melaksakan tugasnya tiap-tiap Organsasi Perangkat Daearh (OPD) bertanggung jawab secara langsung kepada Walikota Makassar. Koordinasi yang dijalankan sebatas pada koordinasi pelaksanaan pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Berikut bagan koordinasi antar OPD dalam melakukan pembinaan pedangang kaki lima dikawasan kota Makassar terkhusus Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini :



Gambar 4.1bagan koordinasi antar OPD dalam melakukan pembinaan pedagang kaki lima dikawasan kota Makassar.

Keterangan :

- = Garis Komando
- = Garis Koordinasi

Koordinasi antar instansi dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik itu Dinas perdagangan, Kantor Camat dan Satpol PP, masing masing memiliki garis komando ke Wali Kota, artinya Wali Kota dapat memperhatikan secara langsung kinerja masing-masing instansi, dan tiap instansi akan melaporkan secara langsung pertanggungjawabannya kepada walikota, adapun garis putus-putus pada tiap instansi yang berarti garis koordinasi, tiap instansi terkait melakukan koordinasi sebagai bentuk kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yakni pembinaan kepada pedagang kaki lima.

Dalam mengkaji hasil penelitian menggunakan prinsip pelaksanaan koordinasi dari Hasibuan dalam Frenly Sukarno (2016:220-222) sebagai berikut: Komunikasi dalam pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Kota Makassar (Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini Konteks koordinasi pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan komunikasi interaktif yang harus mampu melakukan hubungan yang produktif antar OPD. Pada pembinaan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kota Makassar tekhusus Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini. Komunikasi eksternal antar OPD yang terjadi tidak intensif. Komunikasi hanya terjadi saat terdapat pertemuan seperti rapat antar OPD. Setiap OPD memiliki kewajiban terhadap pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Komunikasi yang terjadi kurang efektif karena tidak terdapat diskusi mengenai perkembangan tugas pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang terdapat di kawasan Kota Makassar antar OPD. Tidak adanya sistem akuntabilitas antar OPD menyebabkan tidak ada *feedback* informasi di antara OPD yang terlibat. Padahal

untuk mencapai komunikasi yang efektif seharusnya ada *feedback* yang ditimbulkan dari komunikasi antar OPD.

Ketidakefektifan dalam komunikasi yang terjalin juga terlihat dari adanya perbedaan pemahaman pelaksanaan ketentuan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan dilapangan. Terjadi bentrok dalam upaya penertiban dari Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima mengenai kesepakatan tempat berjualan menjadi bukti bahwa informasi tidak sampai secara baik kepada OPD yang terlibat dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kota Makassar terkhusus di Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini. Selain itu juga, penyampaian informasi yang sering lambat tersampaikan membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan antar OPD masih belum berjalan lancar. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, tiap-tiap OPD yang berwenang harus mampu memposisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan informasi. OPD harus mampu memahami bahwa informasi yang terkait dengan Pedagang Kaki Lima itu sangat penting terhadap OPD lain karena informasi sangat berpengaruh terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga harus tersampaikan kepada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab terhadap pembinaan Pedagang Kaki Lima.

#### 1. Kesatuan tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan anggota tersebut tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu

konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha daripada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan seperti ini adalah suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang berjalan lancar dan baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan telah direncanakan.

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) memiliki tata cara koordinasi antara Dinas Perindustrian dan perdagangan, Satpol PP dan kantor Kecamatan diatur bersamaan oleh ketiga instansi tersebut. Ketiga instansi saling berkoordinasi dalam hal pembinaan merupakan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal penertiban merupakan kewenangan Satpol PP, sehingga dalam hal pendataan merupakan kewenangan Kantor Kecamatan.

Kantor kecamatan membuat penyampaian secara tertulis kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan persoalan pedagang kaki lima yang mengalami tanda-tanda kurang sehat dalam menjalankan usaha maka perlu pembinaan, serta membuat penyampaian kepada Satpol PP persoalan pedagang kaki lima mengalami tanda-tanda melanggar aturan yang telah ditetapkan maka perlu ditertibkan pada daerah tertentu. Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Satpol PP untuk mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Menurut kepala Dinas Perdagangan dari hasil wawancara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, AH menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan penertiban dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka kami melakukan pertemuan setiap instansi untuk membahas terkait tawaran rancangan masing-masing instansi sesuai dengan tugasnya selama proses pemberdayaan. (Hasil wawancara, AH 8 Juli 2019 pukul 11.09 WITA)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di ketahui bahwa dalam kesatuan tindakan didalamnya terdapat unsur ketepatan waktu, dalam hal ini jadwal kerja setiap instansi dalam pelaksanaan pemberdayaan agar terlaksana secara sistematis, sebab jika waktu masing-masing instansi tidak terstruktur sebagaimana mestinya maka berpeluang besar untuk mengalami kekacauan selama proses pelaksanaan masing-masing tanggungjawab antar instansi. Sebagaimana yang di kemukakan oleh pihak Kecamatan Rappocini AR, menyatakan bahwa :

Sangat penting jauh sebelum melaksanakan tugas, kita terlebih dahulu membagi waktu kerja masing-masing instansi, kapan waktunya kantor Camat turun ke Pedagang Kaki Lima, kapan waktunya Satpol PP yang kerja atau kapan waktunya untuk Dinas perdagangan yang ambil alih ini proses pembinaan (Hasil Wawancara AR, 09 Juli pukul 10.40 WITA)

Hal ini juga di benarkan oleh pak FS Kacamatan Makassar, Beliau mengatakan :

Untuk kesatuan tindakan selama proses pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah seharusnya ada jadwal masing-masing instansi kapan waktunya untuk bekerja, kan tidak lucu kalau pihak satpol PP turun langsung kepedagang kaki lima untuk menertibkan kalau pihak kecamatan belum mengirim peringatan terlebih dahulu, nah disini yang bisa menimbulkan kericuhan antara Satpol PP dengan pedagang Kaki lima, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka masing-masing instansi harus di berikan waktu untuk



menyelasaikan masing-masing tugasnya. (Hasil wawancara, AR 09 Juli 2019 pukul 13.19 WITA)

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai kesatuan tindakan masing-masing instansi yang memiliki tupoksi berbeda-beda maka sangat penting kesadaran masing-masing instansi untuk cepat, tanggap dan bertanggungjawab akan masing-masing tugasnya, kesatuan tindakan tidak akan tercapai dalam sebuah koordinasi jika hanya terdapat satu instansi yang bekerja secara serius selama proses pembinaan, oleh karenanya semua instansi yang terkait harus memahami apa-apa saja hak dan kewajibannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh satpol PP Kota Makassar, bahwa :

Kalau kesatuan tindakan, ya tidak mungkinlah cuman satpol PP yang bekerja sedangkan Camat tidak? Itukan namanya pincang, tidak mungkin kami langsung turun saja melakukan penertiban tanpa persetujuan dari Camat, satu kerja semua harus kerja dong, lagian juga selama ini koordinasi antara Camat dan Satpol PP saya rasa sudah cukup baik.

( Hasil wawancara, AR 08 July 2019 pukul 17.05)

Kesatuan tindakan merupakan inti dari koordinasi, dari hasil wawancara di atas bersama Dinas Perdagangan, Kantor Camat dan Satpol PP maka dapat disimpulkan bahwa kesatuan tindakan dalam koordinasi antar instansi untuk pemberdayaan pedagang kaki lima berjalan secara efektif, masing-masing instansi paham apa tanggungjawabnya.

## 2. Pembagian Kerja

Pembagian kerja timbul disebabkan oleh setiap OPD mempunyai batasan untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu, pembagian kerja berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan dan di kelompokkan agar lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Pembagian kerja merupakan pemecahan tugas dengan demikian rupa sehingga setiap orang atau pegawai dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan aktifitas tertentu saja, sesuai dengan pekerjaan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh AH selaku kepala Dinas Perdagangan menyatakan :

Kami dari dinas perdagangan mempunyai tugas untuk membina sesuai dengan hasil kesepakatan dan telah diatur oleh Pemerintah Kota. Untuk pembinaan pedagang kaki lima, Dinas Perdagangan Kota Makassar memiliki Tiga program, yaitu Temu Usaha Kemitraan, Fasilitas modal usaha dan yang ketiga adalah Pembinaan disiplin Pedagang Kaki Lima. Untuk Temu usaha kemitraan dari Dinas Perdagangan Kota Makassar menyediakan pelayanan kemitraan usaha, contohnya kami menjadi fasilitator jika ada pedagang yang mencari kebutuhan pokok jualannya, contohnya ada pedagang yang menjual ayam goreng, maka kami yang mempertemukan pedagang kaki lima itu dengan peternak ayam potong, supaya murah. Nah kalau untuk program kedua, Fasilitas modal usaha, salah satunya kami dari Dinas perdagangan membantu dengan mencari lalu kami pertemukan dengan pihak Bank yang mau memberi bantuan dana secara kredit. Serta program ketiga itu Pembinaan disiplin, karena banyak pedagang kaki lima yang belum terlalu sadar akan kedisiplinan makanya kami adakan sosialisasi (wawancara,AH pada tanggal 08 Juli 2019 pukul 11:45)

Proses pembinaan pedagang kaki lima oleh Dinas Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing instansi, pembagian kerja di maksudkan agar tidak terjadi proses saling berharap dan tiap-tiap pekerja berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, proses pemberdayaan pedagang kaki lima di tangani langsung oleh Dinas perdagangan, pedagang kaki lima oleh Dinas Perdagangan di sediakan tempat sebagai fasilitas selama proses jual beli, Dinas perdagangan juga dalam hal ini menyelesaikan tugasnya dengan memfalsifikasi pedagang kaki lima link untuk memudahkan pemasukan stock dengan harga lebih terjangkau.

Perihal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang ketertiban dan ketentraman menyatakan bahwa:

Kami dari Satpol PP diberi tugas untuk menertibkan dengan membuat pembagian tanggung jawab setiap kecamatan, tiap-tiap satpol PP yang di kasi tanggungjawab tidak boleh lagi ikut-ikutan ke Kecamatan lain, kan sudah punya tanggungjawab sendiri, hal ini di maksudkan agar tiap-tiap Satpol PP tidak setengah-setengah dalam bertugas, tiap-tiap instansi bekerja dengan tugasnya, satpol PP ya tugasnya selama proses penertiban (Hasil wawancara AH, 09 Juli 2019 pukul 10:45)

Pembinaan pedagang kaki lima selama proses pemberdayaan tidak dapat berjalan sendiri, maka di butuhkan instansi lain untuk dapat di ajak bekerjasama, dalam hal ini ialah satpol PP. Satpol PP sebagai yang bertugas dan berwenang untuk melakukan penertiban atas dasar data dari pihak Kecamatan yang bertugas untuk mendata tiap-tiap Satpol PP yang ada pada masing-masing kecamatan.

Sedangkan menurut AR selaku anggota Bidang Kasi Trantib

kecamatan Rappocini menyatakan bahwa:

Pada kantor kecamatan Rappocini pembagian kerja sudah dilaksanakan berdasarkan skill dan latar belakang masing-masing, misalnya staf pada pemerintahan memang pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah Ilmu Pemerintahan sehingga kemampuan dalam bekerja memang sesuai dengan bidangnya. Serta kami memiliki tugas untuk mendata jumlah dan permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima. (wawancara, AR pada tanggal 1 juli 2019 pukul 15:21)

Efektifas kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembagian kerja yang telah dilakukan, adapun sistem pembagian kerja pada Kantor Camat Rappocini di lakukan berdasarkan pada skill masing-masing pekerja, hal demikian dilakukan agar masing-masing pekerja dapat memberi potensi terbaiknya.

Sedang menurut Pak FS selaku Kasi Trantib Kecamatan Makassar berpendapat sebagai berikut:

Bentuk kerjasama Ke camatan Makassar dengan Satpol PP pusat yakni adanya BKO (Bantuan Komando Operasi) dimana mereka menugaskan satpol PP nya untuk bertugas di kantor ini, makanya setiap ada perintah dari komando untuk melakukan pengoperasian di masing-masing Kecamatan, kami dan satpol PP sudah siap.”  
(wawancara FS pada tanggal 1 juli 2019 pukul 12.43)

Pembagian kerja merupakan hal yang penting didalam organisasi atau instansi, pembagian kerja yang efisien akan mendorong keberhasilan suatu tujuan, pembagian kerja yang terlaksana dengan baik, akan mendongkrak kualitas kerja instansi. Sebaliknya, jika pembagian kerja tidak sesuai dan tidak berjalan secara efektif maka para sumber daya yang ada di dalam instansi hanya akan bekerja sekenanya saja, para

sumber daya atau pegawai akan bekerja tanpa tujuan dan target serta hanya saling berharap penyelesaian suatu tugas dan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Makassar bahwa :

Pembagian kerja tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kota Makassar di tanggungjawab oleh 20-25 orang Satpol PP, aturan main dari Bidang Operasi adalah, tiap-tiap kecamatan yang ada pedagang kaki limanya biasanya minta bantuan kekami di bawah naungan Bidang Operasi, tapi semua sudah selesai administrasinya sebelum melakukan penertiban, misalnya dari peneguran pertama, peneguran kedua hingga ketiga, tapi bukan kami yang langsung menertibkan, itu merupakan permintaan dari pihak Kecamatan atau yang memiliki wilayah untuk mengekskusi seperti operasi.”  
(wawancara HA, pada tanggal 08 juli 2019 pukul 16.54)

Pembagian kerja pada Satpol PP Kota Makassar di bagi per kecamatan, hal ini bertujuan agar masing-masing satpol PP dapat fokuus serta profesional bekerja, hal ini juga di peruntukkan agar masing-masing satpol PP dalam bertanggungjawab dengan Kecamatan yang di percayakan.

Hal ini di benarkan oleh salah satu Pedagang Kaki lima, Bu Sri, yang saat ini di Bina saat ini di Kanrerong, menyatakan :

Sewaktu penertiban ada sekitar puluhan Satpol PP yang turun langsung untuk melakukan penertiban, tapi saya pribadi tidak mendapatkan Surat Peringatan, tidak tau kalau pedagang yang lain yang dapat suratnya. Pembinaan ini kan programnya Pemkot, tapi kami mengalami kerugian disini, sewaktu belum di pindahkan saya bisa pekerjakan 2 sampai 3 orang untuk bantu- bantu jualan, lumayan gajinya satu setengah jutaan per orang belumpi lagi uang makannya jadi total satu juta delapan ratus perbulan saya kasih karyawanku setiap bulan, dulu juga sebelum pindah saya bisa 3 jam non stop layani pembeli, bahkan pernahka kredit mobil saat masih di Pettaranika menjul tapi sekarang sudh kulepasmi mobilku krna tdk bisa maka bayarki ciclannya dan hampir itu semua pedagang yang di Pettarani dulu bisa beli mobil dari hasil berdagang, tapi setelah di pindahkan kesni, satu hari paling banyak saya dapat cuma dua ratus ribu itupun kalau dapat ji, jadi sebenarnya kami di

bina disini hanya mendatangkan kerugian ji, sudah banyak itu pedagang yang tutup karena rugi.  
(Hasil wawancara SR, 23 Juli 2019 pukul 20.18)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, probelamtika Pedagang Kaki Lima merupakan permasalahan usang yang masih belum tuntas hingga saat ini, Pedagang Kaki Lima harus di perhatikan lebih jeli lagi, dibina dengan program-program yang tidak asal-asalan, untuk mecapai tujuan ini dibutuhkan orang-orang dengan tujuan dan komitmen serta kualitas kerja yang baik, hal ini berkesinambungan dengan pembagian kerja dan kesatuan tindakan antar instansi maka pembagian kerja antar instansi harus tetap terstruktur dan melaksanakan masing-masing tugasnya terkhusus dalam melakukan penertiban dan pembinaan pada Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima tak semestinya hanya di pindah tempatkan lalu di lepas begitu saja, namun harus di bina agar roda bisnis di kalangan Pedagang Kaki Lima tidak mengalami kelesuan. Pembagian kerja dalam Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah Kecamatan melakukan pemantauan pada wilayah yang terdapat Pedagang Kaki lima yang berada pada wilayah yang tak sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, maka pihak Kecamatan mengirimkan surat peringatan kepada pihak pedagang berupa surat peringatan pertama, peringatan kedua hingga peringatan ketiga, lalu jika tak di indahkan juga maka pihak Kecamatan melakukan kerjasama dengan instansi Satpol PP untuk melakukan Operasi penertiban.

### 3. Bentuk komunikasi antar instansi

Komunikasi merupakan suatu proses dimana sumber mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam cara atau cara. Peran penting komunikasi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari terutama pada instansi pemerintahan. Bericara tentang komunikasi, peran penting komunikasi sangat diperlukan pada instansi pemerintah. Dengan adanya komunikasi yang terjalin secara baik dalam sebuah organisasi dapat menambah keharmonisan hubungan antara karyawan dalam sebuah organisasi itu sendiri yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu kinerja dari setiap karyawan atau pegawainya.

Seperti yang dinyatakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar bahwa :

Kalau kita membahas mengenai komunikasi ya itu harus kita jaga bersama, tidak mungkin sekali kan ada kerja yang selesai kalau kita tidak saling menjaga komunikasi. Ya kalau di Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu sendiri tetap menjaga komunikasi ke atas yaitu dengan walikota, komunikasi juga dengan ke kantor-kantor Camat, yah intinya tidak jalan suatu program kalau komunikasi tidak lancar dengan instansi-instansi yang bekerjasama. Apalagi kalau kita membahas mengenai Pedagang Kaki Lima, Ada beberapa instansi yang kita sama-sama kerja untuk melakukan penertiban dan pembinaan. Adapun komunikasi dengan Pedagang Kaki lima, nah ini di intinya, karena pedagang kaki lima ini jadi objek pembinaan kita, mereka kita ajak sosialisasi, di beri pembinaan sesuai dengan jenis jualannya.

(Hasil wawancara AH, tanggal 10 Juli 2019 pukul 11.45)

Demikian juga pernyataan dari Kantor Camat Kota Makassar:

Kami menjalin komunikasi erat dengan Dinas perdagangan, tidak hanya itu, namun dengan Satpol PP juga, komunikasi dengan

Pedagang Kaki Lima. Mengapa Komunikasi itu penting yah jangan sampai ada kesalahpahaman tujuan atau instruksi. Kalau komunikasinya dengan Pedagang Kaki Lima yah lebih ke tertibannya, siapa dan berapa pedagang kaki lima yang jualan di bahu jalan, ya tugas kami yang memberi peringatan.

(Hasil wawancara FS, 09 Juli 2019 pukul 12.45)

Komunikasi pemerintahan adalah proses penyampaian ide-ide, gagasan, dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuannya yaitu kesejahteraan rakyat, dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Pemerintah saat ini menggunakan komunikasi pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan persamaan persepsi di antara masyarakat dan pemerintah terhadap suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Kota Makassar, mengatakan :

Bentuk Komunikasi antar instansi ya sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing instansi, kami selaku Satpol PP berkomunikasi dengan Kantor camat, baik itu untuk penertiban maupun untuk kepentingan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Tugas kami yah menunggu instruksi dari Kecamatan. (Hasil Wawancara AR, tanggal 10 Juli 2019 pukul 14.30 ).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakuakn oleh peneliti, komunikasi merupakan kunci dari semua perencanaan serta sasaran yang dituju, tanpa komunikasi takkan ada yang berjalan, serta jika komunikasi tak sesuai pada jalurnya maka akan berdampak pada takkan tercapainya kesatuan tindakan serta kekeliruan persepsi, hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima Kecamatan Makassar.



Sebaiknya itu pemerintah kasi kami terlebih dahulu surat pemberitahuan jauh-jauh hari sebelum kami di pindahkan, tapi kalau pihak pemerrintah sudah mengakui kalau ada surat pemberitahuan, yah mungkin yang lain yang dapat, saya tidak tau, bagaimana caranya bentuk komunikasinya kalau begitu (Hasil wawancara AS, 23 Juli 2019, pikul 20.00)

### C. Pembahasan

Koordinasi merupakan bentuk kegiatan mengintegrasikan, mengarahkann, dan menkoordinasikan usur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam proses pencapaian tujuan organisasi, organisasi juga berarti menggerakkan dan mengimbangi tim dengan memberikan kegiatan dan lokasi pekerjaan yang cocok kepada para bawahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2006) bahwa Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel 3.1 Matriks Hasil Koordinasi Antar OPD dalam Pembinaan Pk5

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	Aspek Koordinasi		
	Kesatuan Tindakan	Komunikasi	Pembagian Kerja
Disperindag	Sudah terlaksana dengan baik	Kurang baik	Sudah terlaksana dengan baik
Satpol PP	Sudah terlaksana dengan baik	Kurang baik	Sudah terlaksana dengan baik
Kecamatan	Sudah terlaksana dengan baik	Kurang baik	Sudah terlaksana dengan baik

Pada tabel di atas yaitu matriks hasil Koordinasi antar OPD dalam pembinaan pedagang kaki Lima menunjukkan bahwa dari ketiga aspek dalam koordinasi dari segi kesatuan tindakan dan pembagian kerja sudah terlaksana dengan baik antar OPD dalam pembinaan pedagang kaki lima , sedangkn dari segi aspek Komunikasi eksternal antar OPD yang terjadi tidak intensif. Komunikasi hanya terjadi saat terdapat pertemuan seperti rapat antar OPD. Ketidakefektifan dalam komunikasi yang terjalin terlihat dari adanya perbedaan pemahaman pelaksanaan ketentuan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan dilapangan. Berikut tabel peran dan fungsi Koordinasi antar OPD dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 3.2 Peran dan Fungsi antar OPD dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kota Makassar

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	Tugas dan Fungsi
Disperindag	Disperindag dalam hal ini tugasnya adalah membina langsung pedagang kaki lima yang telah di usulkan oleh kantor camat masing masing yang telah mendata nya
Satpol PP	Satpol PP dalam hal ini tugasnya adalah turun langsung kelapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima

	berdasarkan perintah dari pihak kecamatan yang terkait
Kecamatan	Kecamatan dalam hal ini bertugas mendata pedagang kaki lima yang mengalami tanda-tanda kurang sehat dalam menjalankan usaha maka perlu pembinaan, serta membuat penyampaian kepada Satpol PP persoalan pedagang kaki lima mengalami tanda-tanda melanggar aturan yang telah ditetapkan maka perlu ditertibkan pada daerah tertentu

Sesuai dengan hasil yang telah digambarkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti membahas mengenai data-data yang diperoleh, dikaitkan dengan kajian pustaka atau referensi dalam penelitian ini. Berikut dipaparkan lebih jelas dari hasil penelitian diperoleh oleh peneliti :

Koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (deprtemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien.

Koordinasi dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Rappocini dan Makassar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan

Perindustrian, Kecamatan, dan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugasnya tiap-tiap instansi bertanggungjawab secara langsung kepada Walikota, koordinasi yang dijalankan sebatas pada koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Saat Koordinasi dilakukan akan ada konsekuensi tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Agar dalam pelaksanaannya, tidak terjadi perselisihan maka masing-masing OPD diberikan agar tugas pokok yang berbeda-beda dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Makassar dan Rappocini, melalui pembagian kerja pokok yang berbeda-beda, pertanggungjawaban kepada Walikota dan pengawasan menjadi lebih mudah. Pembagian kerja yang berbeda-beda menurut fungsi yang dimiliki oleh masing-masing instansi merupakan cara yang dipilih pemerintah daerah untuk mewujudkan integrasi dalam koordinasi penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Makassar dan Rappocini. Koordinasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dilakukan untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan tugas, dalam melaksanakan tugas yang dimiliki tiap-tiap instansi memiliki tugas pokok, SOP, dan aturan namun tujuan akhirnya tetap sama. Pelaksanaan-pelaksanaan tugas, dan aturan-aturan yang telah ditetapkan, digunakan untuk menciptakan kesatuan dalam bertindak.

Koordinasi antar instansi dalam melakukan pembinaan didukung oleh beberapa hal yakni, kesatuan tindakan, pembagian kerja dan komunikasi. Bentuk kesatuan tindakan antar instansi dalam melakukan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan untuk pedagang kaki lima, melakukan

kerjasama kepada kecamatan dan satpol PP, masing-masing instansi meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi tetap harus terfokus pada satunya tindakan, dalam hal ini yakni untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Kesatuan tindakan juga berarti ketepatan waktu proses pelaksanaan tugas untuk mencegah terganggunya pelaksanaan tiap-tiap instansi selama proses pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pembagian kerja untuk pemberdayaan pedagang kaki lima di maksudkan agar tiap-tiap orang bekerja sesuai dengan skilnya masing-masing, serta dengan tanggungjawabnya masing-masing, dengan adanya pembagian kerja proses pemberdayaan pedagang kaki lima dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, pembagian kerja di perlukan perincian tugas masing-masing instansi. Pembagian kerja berdasarkan hasil data dari Kecamatan dan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas untuk melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang telah terdaftar sebagai pelaku usaha, memfasilitasi tempat, air, listrik, dan menyediakan mitra kerja. Adapun Kecamatan setempat bertugas untuk melayani pengaduan dari masyarakat setempat apabila ada pedagang kaki lima yang berjualan lalu mengganggu fasilitas umum. Penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan Rappocini dan Makassar dilakukan oleh satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan penyelenggara dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Sinkronisasi dalam koordinasi sangat penting, sinkronisasi merupakan penunjang keberhasilan dalam koordinasi. Seharusnya dalam sinkronisasi

proses koordinasi dapat berjalan dengan lancar sehingga diperoleh keserasian dalam bertindak, disinilah letak peran dan fungsi dari adanya komunikasi.

Bentuk pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada para pedagang kaki lima khusus Kecamatan Rappocini berupa pebertiban di tempat sebelumnya, di pindah tempatkan di Kanrerong, di berikan fasilitas berupa tempat, *free* air dan listik selama 7 bulan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menyediakan mitra kerja, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima yang di bina di Kanre Rong, mereka mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan sudah ada beberapa yang tutup.

Oleh karena itu terepas dari kordinasi antar instansi yang mencakup kesatuan tindakan, pembagian kerja hingga komunikasi, maka diperlukan adanya evaluasi kinerja hasil pemberdayaan, apakah ketiga intansi yang telah berkoordinasi dalam waktu yang cukup panjang telah berhasil mewujudkan proses pemberdayaan yang menguntungkan tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi pihak pedagang kaki lima. Koordinasi yang baik seharusnya dapat menghasilkan pemberdayaan yang berhasil pula.

Adapun kekurangan pada setiap OPD dalam pembinaan pedagang kaki lima yaitu Kekurangan dinas perdagangan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam melakukan pembinaan kepada pedagang kaki lima yang telah terdaftar sebagai pelaku usaha berupa penertiban dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak dinas perdagangan dengan pedagang kaki lima sehingga

terjadinya perselisihan antara dinas perdagangan dengan pedagang kaki lima serta dinas perdagangan tidak memperhatikan proses selama melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima sehingga menyebabkan kerugian bahkan ada yang menutup usahanya.

Sedangkan Kekurangan SATPOL PP Kota Makassar belum melaksanakan tugasnya secara optimal, dimana Satpol PP Kota Makassar tidak terlalu tegas dalam menindak Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu aparat Satpol PP tidak melakukan komunikasi dengan pedagang kaki lima dalam melakukan penertiban demi menghindari kericuhan selama proses penertiban dan menjaga dan menjaga komunikasi dengan pihak pedagang kaki lima.

Begitu pun dengan Kecamatan masih memiliki kekurangan belum melaksanakan tugasnya dalam hal pendataan pedagang kaki lima secara efektif dan kurangnya koordinasi terhadap SATPOL PP dan Dinas Perdagangan dalam kebutuhan yang diinginkan berupa fasilitas yang diinginkan oleh Pedagang Kaki Lima serta kurangnya sosialisasi terhadap pembinaan dan pemberdayaan kepada Pedagang Kaki Lima di kawasan Kota Makassar terkhusus di Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini.

Hal ini dibenarkan oleh Hasibuan sebagai mana teorinya dikatakan bahwa kesatuan tindakan pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebb itu konsep

kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan daripada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu yang dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Koordinasi antar instansi dalam melakukan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Rappocini dan Makassar meliputi tiga aspek, yakni aspek kesatuan tindakan, aspek komunikasi dan aspek pembagian kerja :
  - a. Koordinasi antar instansi dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dalam aspek kesatuan tindakan, koordinasi antar instansi berjalan sesuai dengan garis komando yang telah ditetapkan.
  - b. Koordinasi antar instansi ditinjau dari aspek pembagian kerja sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan tugas masing-masing instansi. Dinas perdagangan melakukan tugasnya untuk melakukan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima. Kecamatan melakukan tugasnya untuk mendata pedagang kaki lima di masing-masing kecamatan yang membutuhkan bantuan berupa fasilitas lalu mengkoordinasikan kepada Dinas Perdagangan, serta melakukan sosialisasi. Adapun tugas dari satpol PP yakni melakukan penertiban berdasarkan laporan dari kantor kecamatan.
  - c. Koordinasi antar instansi dari aspek komunikasi Komunikasi eksternal antar OPD yang terjadi tidak intensif. Komunikasi hanya terjadi saat terdapat pertemuan seperti rapat antar OPD. Ketidakefektifan dalam komunikasi yang terjalin terlihat dari adanya perbedaan pemahaman

pelaksanaan ketetapan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan dilapangan. Terjadi bentrok dalam upaya penertiban dari Satpol PP kepada Pedagang Kaki Lima mengenai kesepakatan tempat berjualan menjadi bukti bahwa informasi tidak sampai secara baik kepada OPD yang terlibat dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kota Makassar terkhusus di Kecamatan Makassar dan Kecamatan Rappocini. Selain itu juga, penyampaian informasi yang sering lambat tersampaikan membuktikan bahwa komunikasi yang dilakukan antar OPD masih belum berjalan lancar. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, tiap-tiap OPD yang berwenang harus mampu memosisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan informasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi instansi terkait pelaksanaan Koordinasi antar instansi dalam pembinaan pedagang kaki lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pemegang tanggungjawab dalam melakukan pembinaan pedagang kaki lima telah melakukan tugas dan fungsinya tetapi pembinaan bagi pedagang kaki lima ternyata menyebabkan kerugian bahkan menutup usahanya.

1. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih memperhatikan proses selama melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima, salah satunya ialah lebih merutinkan pertemuan dan komunikasi serta melakukan evaluasi kerja.

2. Satpol PP lebih meningkatkan komunikasi dengan pedagang kaki lima sebelum melakukan penertiban demi menghindari kericuhan selama proses penertiban dan menjaga komunikasi dengan pihak kecamatan.
3. Kecamatan harus lebih memperhatikan pedagang kaki lima, dalam hal ini ialah sebelum satpol PP melaksanakan tugasnya untuk menertibkan, maka kecamatan harus terlebih dahulu mengirimkan surat peringatan kepada Pedagang kaki lima. Pihak kecamatan lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., Fathurrohman, F., & Hidayat, Z. (2013). Upaya Meningkatkan Koordinasi dalam Mengembangkan Industri Pariwisata Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(1), 197-206.
- Bahar Amin, Adam. 2011. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. (*Skripsi*). Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fauziyyah, M. R. dan Sugi Rahayu, M. P.2017. *Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Wates*, Kabupaten Kulon Progo.
- Handyaningrat, Soewarno. 2004. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- . 2002. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Handoko, T Hani. 2005. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- . 2003. *Manajemen*. Edisi Ke II. Yogyakarta : BPFE.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jasin. 2011. *Manajemen Modern, Prinsip dan Praktek*. Jakarta: PDIN – LIPI
- Kasmad, R., & Alwi, A. (2015). Democratic Model of Public Policy Accountability. Case Study on Implementation of Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(2), 186-202.
- Kristiadi, 2004. *Administrasi/Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LAN-RI.
- Lovelock, H. Crishtopher. 1992. *Managing Service; Marketing Operation and Humans Resources*, New Jersey, Prentice Hall International, Inc
- Mahsyar, A. (2014). Model Koordinasi Antarinstansi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Makassar. *Jurnal EL-RİYASAH*, 5(2), 11-20.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung*.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung. Penerbit: Mandar Maju.

- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Normann, Richard. 2008. *Service Management; strategy and Leadership in Service Business*. Brisbane, Jacaranda and Sons.
- Ramto, Bun Yamin, 2001. *Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Menghadapi Dinamika Sosial dan Global*. Fisip-Unpad.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *metode Penelitian; kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfaberta.
- Suminar, R. (2015). *Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Suradinata, 2009. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Kondisi Era Globalisasi*, Bandung, CV. Ramadhan.
- , 2007. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan. Cetakan I*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto, 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tamim, Djoenaedi. 2002. Beberapa Masalah yang dihadapi bidang Administrasi pemerintah dalam Penyelenggaraan Tugas Umum pemerintahan dan Pembangunan di Instansi Pemerintah. Jakarta: STIALAN.
- Yunus, Muhammad. (2017) *Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)* Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Volume 3 Number 1 Juni 2017

#### **Peraturan Perundang – Undangan :**

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Prosedur Kontrol Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015.

Surat Keputusan Walikota Makassar No.44 Tahun 2002 pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima tidak diperbolehkan menempati bahu jalan dan trotoar.



**L**

**A**



Berikut jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Makassar pada tahun

2019

NO	NAMA KELURAHAN	NO	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	NAMA UKM
1	KEL. BARA-BARAYA SELATAN	1	Irmawati	Jl. S. Saddang Baru Lr.5/5	Makanan Jadi
		2	Sari Ismayani	Jl. S. Saddang Baru Lr.5/5	Gorengan
		3	Hamzah	Jl. Ablam 3 No.25 A	Bibit Ayam
		4	Murniati	Jl. Ablam 1	Pisang
		5	Saleha	Jl. Ablam 1	Sayuran
		6	Ramlah	Jl. Ablam	Gorengan
		7	Diana Mappi	Jl. Ablam 3 Lr.3 No.20	Jualan Nasi Goreng
		8	Dg. Baji	Jl. Ablam 1	Kue
		9	Ayu Surianti	Jl. Ablam 3 No.54	Jual Sandal Barang Campuran
		10	Hanipa	Jl. Ablam 1 No.38	Jual Sandal Barang Campuran
2	KEL. BARA-BARAYA UTARA	1	Dg. Bua	Jl. Kerung-kerung Santaria	Jual Barang Campuran
		2	Dg. Hasna	Jl. Kerung-kerung Santaria	Jual Rokok
		3	Dg. Rate	Jl. Muh. Yamin Lr.XI No.2	Jual Makanan Ayam
		4	Dg. Nurdin Moha	Jl. Kerung-kerung	Tambal Ban
		5	Dg. Madi	Jl. Kerung-kerung	Tambal Ban
		6	Iwan	Jl. Kerung-kerung	Tukang Cukur Dan Jual Pulsa
		7	Hamida	Jl. Kerung-kerung No.72	Jual Kue
		8	Muthar	Jl. Muh. Yamin	Tambal Ban
		9	Muh. Akbar	Jl. Muh. Yamin No.107	Cuci Motor
		10	Anwar	Jl. Muh. Yamin	Tambal Ban
		11	Awal	Jl. Muh. Yamin	Jual Pisang
		12	Dg. Bulan	Jl. Muh. Yamin	Jual ayam kentucky
		13	Ida	Jl. Muh. Yamin	Jual Gorengan
		14	Maryam	Jl. Muh. Yamin	Jual Nasi Goreng
		15	Muh. Toha	Jl. Muh. Yamin	Jual Gorengan
		16	Endang	Jl. Muh. Yamin	Jual Nasi Kuning
		17	Iskandar	Jl. Muh. Yamin	Cuci motor / Tambal Ban



		18	Djamil	Jl. Muh. Yamin	Tambal Ban
		19	Muh. Rusli	Jl. Muh. Yamin	Tukang Cukur
		20	Mas Kopur	Jl. Muh. Yamin	Jual Gorengan
		21	Ferdi	Jl. Muh. Yamin	Jual Gorengan
		22	Nurham Ana	Jl. Muh. Yamin	Jual Nasi Kuning
3	KEL. MARICAYA	1	Murni Sriyanti	Jl. Poros Pelanduk	Campuran
		2	Nurlela	Jl. Poros Pelanduk	Campuran
		3	Sultan Hatijah	Jl. Poros Pelanduk	Campuran
		4	H. Tika	Jl. Poros Rusa	Warung Pallu Basa/Sate
		5	Sinar	Jl. Domba	Campuran
		6	Farida	Jl. Domba-Rusa	Coto Makassar
		7	Tahirah / Rasbar	Jl. Poros Domba	Warkop
		8	Rustam	Jl. Domba	Pulsa
		9	Enny Hakim	Jl. Poros Lembu	Warung Campuran
		10	Generosa	Jl. Poros Lembu	Warung Makan
		11	Baso Topan	Jl. Poros Anuang	Warung Makan
		12	H. Hamma	Jl. Poros Harimau	Coto Makassar
		13	Sofyan	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		14	Jufri	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		15	M. Rais	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		16	Abd. Kadir	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		17	Boy Sandi	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		18	Basri	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		19	Syahrir A	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Kunci
		20	Syawal	Jl. Poros Domba	Tambal Ban
		21	Suripto	Jl. Poros Kijang	Mie Bakso
		22	Adi	Jl. Poros Monginsidi	Tukang Buat Kunci
		23	Mas Nardi	Jl. Poros Pelanduk	Soto Ayam / Gado-gado
		24	Marwan	Jl. Poros Anuang	Pulsa
		25	Dudding Dg. Tayang	Jl. Poros Domba	Mie Goreng
		26	Mulyono	Jl. Poros Kijang	Mie Goreng & Kuah
		27	Surani	Jl. Poros Rusa	Nasi Kuning
		28	Arief Fadillah	Jl. Poros Rusa	Martabak / Teran Bulan
		29	Mahfud	Jl. Poros Pelanduk	Tambal Ban
		30	Reza Andi	Jl. Poros	Campuran

		Patempo	
		31 Sari	Jl. Poros Kijang Makanan
		32 Hendra Moechtar	Jl. Poros Rusa Ceker Ayam
		33 Topanpan	Jl. Lembu Pulsa
		34 Pandika	Jl. Kijang Gorengan
		35 St. Aisyah	Jl. Lembu No.19 Lopis Monginsidi
		36 Thamrin Hasan	Jl. Anuang Pulsa
		37 Kamal	Jl. Domba Pres Ban
		38 Wanda	Jl. Poros Monginsidi Minuman
		39 Herman	Jl. Monginsidi Tukang Kunci
		40 Dian	Jl. Kijang Poors Nasi Kuning
		41 Ratna Sari	Jl. Kijang Minuman
		42 Jeni	Jl. Kijang Poros Bakso
		43 Alfrida	Jl. Poros Lanto Kue
		44 Maskan	Jl. Poros Rusa Es Campur
		45 Sukma	Jl. Poros Lanto Es
		46 Rohani Hasan	Jl. Harimau Makanan Jadi
		47 Wandu	Jl. Vetran Selatan Tambal Ban
		48 Tumiyem	Jl. Kijang Poros Bakso
		49 Rusli	Jl. Vetran Selatan Tambal Ban
4	<b>KEL. MARADEKAYA</b>	1 Saharuddin	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Sepatu Bekas
		2 Baharuddin	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Baju Bekas
		3 Supia Anwar Yusuf	Jl. Vetran Utara Lr.43 Warkop / Taman Baca
		4 Dg. Pata	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Kaca Mata
		5 Rifai	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Beli Sepatu Bekas
		6 Darius Joni	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Lampu dan Dompot
		7 Rusli Dg. Gassing	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual jam Tangan
		8 Hj. Sanneng	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Gorengan
		9 Alimuddin	Jl. Vetran Utara Lr.43 Service Jam Tangan
		10 Tangke	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Beli Arloji
		11 Mangkona Palinge	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Alat-alat Listrik
		12 Majid	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Kopi
		13 Ambo Iwan	Jl. Vetran Utara Lr.43 Jual Sepatu Bekas
		14 Rumiatty , Se	Jl. G. Latimojong Jual Kue

		15	Tommy Alexander	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Sepatu Bekas
		16	Sumarni	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Gorengan
		17	Syamsinar	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Gorengan Dan Minuman
		18	Sahir	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Hp Bekas
		19	Rachmatan	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Hp Bekas
		20	Rahman Dg. Ranyu	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Hp Bekas
		21	Norma	Jl. Vetran Utara Lr.43	Jual Campuran
5	<b>KEL. LARIANGBANGI</b>	1	Macmud	Jl. G. Bambapuang II No.2	Klontongan
		2	Bunga	Jl. G. Bambapuang 1	Mie bakso
		3	Ikbal Al Ikhwal	Jl. G. Latimojong Lr.76	Reparasi Kunci
		4	Nuraini	Jl. G. Latimojong Lr.76 No.9	Klontongan
		5	Sajarah	Jl. G. Latimojong Lr.76	Jual Bensin Eceran
		6	Dasuki	Jl. G. Latimojong	Jual Gorengan
		7	Latif	Jl. G. Latimojong No.74	Press Ban
		8	Yoseph	Jl. G. Latimojong	Press Ban / Bensin
		9	P. Liman	Jl. G. Latimojong	Klontongan / Bensin
		10	Sahabuddin	Jl. G. Latimojong	Timbang Emas
		11	Sattar Dg. Lau	Jl. G. Lokon	Sop Sodara & Ikan
		12	Dg. Lalang	Jl. S. Pareman	Jual Buah-buahan
		13	Miri	Jl. S. Pareman	Press Ban
		14	Ahmad	Jl. Bulu Dua	Press Ban
		15	Nurhaedah	Jl. Bulu Dua	Jual Gorengan
		16	Basri	Jl. Vetran Utara	Eceran Bensin
		17	Sadariah	Jl. Nico	Klontongan
		18	Mariani Dahlan	Jl. G. Bambapuang II	Klontongan
		19	Adi Samidi	Jl. Bulu Dua	Mie Pangsit & Bakso
		20	Ratna	Jl. Bulu Dua	Klontongan
		21	Ishak	Jl. Bulu Dua	Sop Sodara & Ikan
		22	H. Muh. Rum	Jl. Metro Square Blok.C	Klontongan
6	<b>KEL. BARA-BARAYA TIMUR</b>	1	Agus Suwinto	Jl. Ab. Lambogo Lr.10	Jualan Empek-empek
		2	Dg. Ngunta	Jl. Ab. Lambogo	Jual Es Doger

		Lr.10	
3	Taufik Hidayat	Jl. Ab. Lambogo Lr.10	Jual Batagor
4	Suriani	Jl. Ab. Lambogo Samping Indo Maret	Jual Kue & Nasi Kuning
5	Rini Arianti	Jl. Ab. Lambogo No.128	Jual Kue
6	Syamsul Sumidi	JL. Ab. Lambogo No.152	Jual Bakso
7	Tit Sulastri	Jl. Ab. Lambogo No154	Jual Pop Ice
8	Handayani Hamid	Jl. Ab. Lambogo No.164	Jual Kue
9	Avan Evendi	Jl. Ab. Lambogo No.166	Jual Ayam Crispy
10	Salmah	Jl. Inspeksi Kanal Sinrijala	Jual Kue
11	Hamsah Dg. Ngawing	Jl. Ab. Lambogo Lr.12	Jual Bakso
12	Asrawati	Jl. Inspeksi Kanal Sinrijala	Jual Pop Ice
13	Hafriani Hamid	Jl. Ab. Lambogo Lr.12 No.19	Jual Pop Ice
14	Selvi Ramadani Fitri	Jl. Ab. Lambogo Lr.10 No.9	Jual Pop Ice & Gorengan
15	Ardi	Jl. Inspeksi Kanal	Jual Bakso
16	Halima	Jl. Inspeksi Kanal	Jual Bakso Goreng
17	Rustam	Jl. Inspeksi Kanal Sinrijala	Jual bakso
18	Hj. Mansia	Jl. Muh. Yamin Baru	Jual Kue
19	Miranti	Jl. Muh. Yamin Baru No.53	Jual Gorengan
20	Idayani	Jl. Ab. Lambogo No.189B	Jual Pop Ice
21	Endang Sudarwati	Jl. Ab. Lambogo No191	Jual Gorengan
22	Muhalia	Jl. Ab. Lambogo No.176	Jual Kue & Gorengan
23	Saharuddin Badiri, Sh	Jl. Ab. Lambogo No.217	Jual Pop Ice
24	Syamsiah	Jl. Ab. Lambogo No.204	Jual Es Teler
25	Rosdiana	Jl. Ab. Lambogo	Jual Pop Ice

			No.200		
		26	Purnomo	Jl. Ab. Lambogo No.196	Jual Gorengan
		27	Riska Jafar Mallo	Jl. Ab. Lambogo Lr.17 No.1	Jual Makanan Jadi
		28	Abdul Onim	Jl. Ab. Lambogo No.181	Jual Teran Bulan & Martabak
		29	Harifin	Jl. Muh. Yamin Baru No.51	Jual Nasi Kuning
		30	Darifi	Jl. Muh. Yamin Baru No.43	Jual Es Buah
		31	H. Amiruddin	Jl. Ab. Lambogo No.204	Jual Nasi Kuning
		32	Romi	Jl. Ab. Lambogo No.170	Jual Bubur Ayam
		33	St. Jamila	Jl. Muh. Yamin Baru No.112	Jual Kue
		34	Jamal Dg. Ngerang	Jl. Inspeksi Kanal Sinrijala	Jual Bakso
		35	Jumaria	Jl. Ab. Lambogo Lr.10	Jual Jalang Kote
7	<b>KEL. BARANA</b>	1	Delima Sadillah	Jl. Vetran Utara	Kue & Campuran
		2	Mappa Lewa	Jl. Kerung-kerung	Topi & Songkok
		3	Dg. Manai	Jl. Kerung-kerung	Tas, Kaos Tangan & Topi
		4	Alimuddin	Jl. Kerung-kerung	Campuran
		5	H. Mustaming	Jl. Kerung-kerung	Topi & Mantel
		6	Hj. Dg. Ngenang	Jl. Kerung-kerung	Kaos Tangan & Jas Hujan
		7	Mappa Dg. Jalling	Jl. Kerung-kerung	Alat Pertukangan
		8	Nurbiyati	Jl. Kerung-kerung	Topi
		9	Roha	Jl. Kerung-kerung	Jagung Makanan Ayam
8	<b>KEL. MACCINI</b>	1	Sugiono	Jl. Urip Sumoharjo Lr.79	Gorengan
		2	A. Yusmiati	Jl. Urip Sumoharjo Lr.79/8	Nasi Kuning
		3	Ny. Sumiati	Jl. Urip Sumopharjo Lr.79 No.1G	Campuran
		4	A. Ninrawaty	Jl. Urip Sumoharjo Lr.79 No.8B	Nasi Kuning
		5	Rugayya	Jl. Maccini Sawah	Kopi dan Kue

6	Dg. Nai	Jl. Maccini Sawah	Es Dan Kue
7	Eryanti	Jl. Maccini Sawah	Pulsa Dan Campuran
8	Jamila	Jl. Maccini Sawah	Jual Pop Ice
9	Hj. Nur	Jl. Maccini Sawah	Nasi Kuning
10	Dg. Nassa	Jl. Maccini Sawah	Press ban
11	Mini	Jl. MCN PSR Malam IV No.2C	penjual bakso
12	Dg. Ewa	Jl. Urip Sumoharjo Lr.5	penjual bakso
13	Jumriati	Jl. Masjid Babul Jannah No.30	Jual Jilbab
14	Dg. Nai	Jl. MCN PSR Malam No.30	Kacamata
15	Jumasia	Jl. Maccini Raya Lr.2 No.6B	Pakaian
16	Dg. Ratu	Jl. Masjid Jannah No.17	Campuran
17	Halik	Jl. Masjid Babul jannah No.9A	Campuran
18	Anwar Rahim	Jl. Masjid Babul Jannah No.21	Campuran
19	Hasni	Jl. MCN PSR Malam II/4	Jual Bakso
20	Eda	Jl. MCN PSR Malam II/1A	Pop Ice
21	Mantang	Jl. MCN PSR Malam IV	Nasi Kuning
22	A. Mariati	Jl. MCN PSR Malam II/21A	Pop Ice / Gorengan
23	A. Sakka	Jl. MCN PSR Malam 2/21B	Ba'wang
24	Dg. Sani	Jl. MCN PSR Malam 2/1	Putu
25	Marwah	Jl. MCN PSR Malam 2/1	Es Teler
26	Nompo	Jl. MCN PSR Malam 2/1	Baroncong
27	Tija	Jl. MCN PSR Malam 2/1	Es Teler
28	Nuria	Jl. Maccini Raya 123	Kue-kue
29	Yana	Jl. Maccini Raya 123	Es Buah / Es Teler
30	Pinmi	Jl. MCN PSR Malam	Gorengan

			3/3		
		31	Hasriyanti	Jl. Maccini Sawah Lr.2	Makanan
		32	Dg. Siani	Jl. Maccini Sawah Lr.3	Makanan
		33	Abd. Rahim	Jl. Maccini Tengah Lr.3	Campuran
		34	Abd. Rasyid	Jl. Kerung-kerung	Gorengan
		35	Yudistira	Jl. Maccini Sawah	Makanan
		36	Wati	Jl. Maccini Sawah	Makanan
		37	Hasnah	Jl. Maccini Tengah Lr.2	Campuran / Makanan
		38	Dg. Erang	Jl. Maccini Sawah	Campuran
		39	Hj. A. Rosmiati	JL. Maccini Raya	Campuran / Makanan
		40	Dahlia	Jl. Maccini Tengah	Campuran
		41	Suratman	Jl. Maccini Kidul	Pangsit Bakso
		42	Imam	Jl. Maccini Kidul	Gorengan
		43	Ahmar	Jl. Maccini Kidul	Sate
		44	Asniar	Jl. Maccini Baru	Aneka Minuman Dingin
		45	Masyita Amin	Jl. Maccini Sawah	Bakso Bakar / Aneka Minuman
		46	Citra Wahyuni	Jl. Maccini Kidul	Bakso Bakar
9	<b>KEL. MACCINI GUSUNG</b>	1	Kamaruddin Dg. Bantang	Jl. Kerung-kerung	Jahit Jual Sepatu
		2	Jumain / Bejo	Jl. G. Bawakaraeng	Jual Bakso
		3	Anwar / Lia	Jl. G. Bawakaraeng	Jual Barang Campuran
		4	Winoto Sulistio	Jl. Maccini Baru	Jual Bakso & Pangsit
		5	Dahlan	Jl. Maccini Baru	Jual Beli Alat Motor
		6	Aswar	Jl. Maccini Baru	Jual Beli Alat Motor
		7	Kamaruddin Dg. Bantang	Jl. Maccini Baru	Jual Beli Alat Motor
		8	Husri Abu Hasyi	Jl. Maccini Baru	Jual Beli Alat Motor
10	<b>KEL. BARA-BARAYA</b>	1	Israyanti	Jl. Ab. Lambogo No.59	Gorengan Dan Minuman
		2	Sarifa	Jl. Ab. Lambogo	Jual Es Buah Dan

			No.63	Sari Kue
		3	Dg. Intang Jl. Ab. Lambogo No.67/77	Jual Makanan Jadi
		4	Saniasa Jl. Ab. Lambogo No.81	Jual Minuman Dingin
		5	Emmy Jl. Ab. Lambogo No.1	Jual Bakso
		6	Rabasia Jl. Ab. Lambogo 76	Jual Barang Campuran
		7	Mahrul Jl. Ab. Lambogo No.70/08	Jual Barang Campuran & Mie Siram
		8	Lis Mardiana Jl. Ab. Lambogo No.115	Jual Nasi Kuning
		9	Zumaroh Jl. Ab. Lambogo No.100	Jual Es Buah
		10	Eka Jl. Ab. Lambogo 104	Jual Pulsa
11	<b>KEL. MARADEKAYA SELATAN</b>	1	Ical Jl. G. Latimojong	Tukang Duplikat Kunci
		2	Marthen Jl. G. Latimojong	Penjual bakso
		3	Mas Nur Jl. Sungai Saddang	Penjual Sari Laut
		4	Saparuddin Jl. Sungai Saddang	Penjual Gorengan
		5	Rahma Jl. Sungai Saddang	Penjual Sate
		6	Mas Suri Jl. Sungai Saddang	Penjual Sari Laut
		7	Sain Jl. Vetran	Tukang Press ban
		8	Ani Jl. Vetran	Penjual bakso
		9	Kajin Sugito Jl. Vetran	Penjual Nasi Goreng
		10	Arif Jl. Vetran	Penjual Sari Laut
		11	Siswanto Jl. Sungai Saddang	Penjual Sari Laut
		12	Mauhaimil Jl. Sungai Saddang	Martabak
		13	Mas Joko Jl. Vetran	Sari Laut
12	<b>KEL. MARICAYA BARU</b>	1	H.Syarifuddin Jl.Batu Putih	Coto
		2	Ishak Jl.Bulukunyi	Pres Ban
		3	Arsyad Dg.Nassa Jl.Gunung Batu Putih	Pallu Basa
		4	Mursalim Jl.Monginsidi	Jualan Rokok
		5	Abd.Hakim Jl.Monginsidi	Nasi Kuning
		6	Junaedi Jl.Rappocini Raya	Pres Ban
		7	Bado Jl.Vetran Utara	Pres Ban
		8	Dg.Lili / Salma Jl.Sungai Saddang	Ayam Goreng
		9	Cacce Jl.Vetran Selatan	Jual Barang Campuran



		10	H.Tinggi	Jl.Gunung Batu Putih	Sop Sodara	
		11	Sunarya	Jl.Vetran Selatan	Makanan Ringan / Rokok	
		12	Abdul Kadir	Jl.Monginsidi	Jual Assesoris Motor	
		13	Abdullah Dg.Sikki	Jl.Vetran Utara	Barang Campuran	
		14	Patiman Odda	Jl.Gunung Batu Putih	Barang Campuran	
		15	Mustari	Jl.Gunung Batu Putih	Jual Bakso	
		16	Dg.karimong	Jl.Vetran Ujtara	Ikan Bakar	
		17	H.Sakka	Jl.Gunung Batu Putih	Jual Teh & Kopi	
		18	H.Badahang	Jl.Gunung Batu Putih	Barang Campuran	
		19	Ismail	Jl.Kijang	Coto	
		20	Herman Sp	Jl.Sungai Mapilli	Topi	
		21	Dg.Kebo	Jl.Rappocini Raya	Ayam Goreng	
		22	H.Badahang	Jl.Syarif Al Qadri	Coto	
		23	Abd.Rahman	Jl.Monginsidi	Rokok	
		24	Dg.Jufri	Jl.Sungai Saddang	Ayam Goreng	
	13	<b>Kel. Maradekaya Utara</b>	1	M. Rais	Jl. S. Limboto	Jual Pallu Basa
			2	Sabang Dg Sese	Jl. S. Limboto	Jual Barang Campuran
			3	Aisyah	Jl. S. Limboto Lr.49	Jual Barang Campuran
			4	Juddin	Jl. G. Salahutu	Jual Buah
			5	Amir Dai	Jl. G. Salahutu III	Jual Ikan Bakar
			6	Dg. Kulle	Jl. G. Salahutu	Jual Kopi
			7	Norma	Jl Vetran	Pres Ban Motor
			8	H. Abd. Kadir	Jl. Vetran Lr.44	Jual Pallu Basa
			9	Idris / Maemunah	Jl. Vetran	Jual Ikan Bakar
10			Rahman	Jl. Vetran	Jual Sadel Motor	
11			Arifin	Jl. Vetran	Jual Barang Campuran/Kopi	
12			Said	Jl. Vetran	Jual Bassang	
13			Dg. Sikki	Jl. Vetran	Jual Sadel Motor	
14			Muchtar Mile	Jl. Vetran Lr. 46	Kedai Kopi	
15			Nama Tidak Diketahui	Jl. Vetran Utara Lr.45	Jualan Bakso	
16			Nama Tidak Diketahui	Jl. Vetran Utara Lr.45	Warung Makan	
17			Syamsul	Jl. G. Salahutu	Press Ban	
18			Dg. Dolo	Jl. Kerung-kerung	Jual Kayu Bekas	

14	<b>Kel. Maccini Parang</b>	1	Mansyur Lolang	Jl. Maccini Tengah 4/15	Jual Es Teler
		2	H. Said	Jl. Kemauan 1 No.16	Jual Coto
		3	Mas Inul	Jl. Maccini Tengah	Jual Mie Bakso
		4	Mas Wagimin	Jl. Kesatuan	Jual Mie Bakso
		5	Misriani	Jl Kemauan 2 No.10	Jual Barang Campuran
		6	Dg. Kanang	Jl.Maccini Raya	Jual Barang Campuran
		7	Iriyanto	Jl. Maccini Raya	Soto Ayam, Gado- gado
		8	Mas Gufron	Jl. Kemauan Raya	Soto Ayam, Gado- gado
		9	Irwan Hamid	Jl. Kemauan 1 No.32	Jual Coto & Kikil
		10	Suryani Asis	Jl. Kemauan 2 No.18	Jual Barang Campuran
		11	Erni	JL.Kesatuan 3 No.24	Jual Barang Campuran
		12	Usman Dg. Lale	Jl. Kemauan No.6	Jual Es balok
		13	Laila	JL. Maccini Raya Lr.4 No10	Jual Barang Campuran
		14	Dg. Sul	Jl. Maccini Raya Lr.4 No.15	Jual Makanan Jadi

Data Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini :

NO	NAMA KELURAHAN	NO	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	NAMA LAPAK		
1	KEL. BONTO MAKKIO	1	Hamri Hamya		Tri Murti		
		2	Hamri Hamya		Tri Murti		
		3	Rahmat		Kue-Kue/Apang		
		4	Rezki/Kanna		Putu		
		5	Usman Cahaya		Massipa (Nasi Kuning)		
		6	Mas Indra		Bubur Ayam Bandung		
		7	Adin		Nasi Kuning		
		8	Bunda Ety		Gado-Gado		
		9	Astanim		Stiker		
		10	Linda		Nasi Kuning		
		11	Hartaman		Nasi Kuning		
		12	Mbak Purwanti		Nasi Kuning		
		13	Irfan		Sop Janda		
		14	Edy Kurniawan		Batu Permata		
		15	Pak Olif		Bubur Manado		
		16	Muslimin		Batu Permata		
		17	Sutrisno		Batu Permata		
		18	Rusni		Bassang		
		19	Mbak Anggi/Rahmayanti		Nasi Kuning		
		20	Husnawaty/Bunda Arni		Gado-Gado		
		21	Irwan Edi		Nasi Kuning		
		22	Ibu Ani		Pisang Ijo		
		23	Zainuddin/Ibu Salwah		Putu Cangkir/ Klp Muda		
		24	Panjul/Mas Joko		Sari Laut Mas Joko		
		25	Ibu Tini		Sari Laut Mbak Tini		
		26	Mbak Ria		Sari Laut		
		27	Mbak Tri		Sari Laut		
		28	Mas Tofa		Sari Laut		
		29	Mbak Iin		Sari Laut		
		30	Mas Abi		Sari Laut		
				31	Mas Ikram		Nasi Goreng
				32	Mbak Lily		Sari Laut

		33	Sumarno		Sari Laut
		34	Mas Gondrong		Nasi Goreng
		35	Fendy		Sarabba
		36	Mbak Anis/Slamet		Sari Laut
		37	Sharin		Sari Laut
		38	Cieny Cristin		Nasi Goreng
		39	Syahrial		Sari Laut (Pancoran)
		40	Sarly		Jus Buah
		41	H. Abd. Rauf Tj		Roti Bakar
		42	Ashidiq		Gorengan
2	<b>KEL. GUNUNGSARI</b>	1	Muh. Idrus Dg. Lewa	Jl. Bonto Tangnga	Bengkel
		2	Salma Dg. Sunggu	Jl. Sultan Alauddin	Aksesoris
		3	Mattu Dg. Nanra	Jl. Sultan Alauddin	Es Kelapa
		4	Reynool Iskandar	Jl. Lebaksio Lor	Terang Bulan
		5	Rukaya R	Jl. Perum. Griya Barombong	Campuran
		6	M. Trisakti	Jl. Datuk Ditiro No.2	Pakaian
		7	Bahtiar	Jl. Banyuanyara	Optik
		8	WirsaHyu Sari R	Jl. Muh. Jufri Iv No. 44	Pulsa
		9	Hj. Salma	Taipak Kodong/Palangga	Campuran
		10	Herman	Taipak Kodong/Palangga	Kaos Kaki
		11	Ramli Hn	Taipak Kodong/Palangga	Campuran
		12	Idris	Jl. Sultan Alauddin Ii	Cafe
		13	Muh. Tatta Abubakar	Jl. Toddopuli	Boneka
		14	Husain	Maros	Pakaian
		15	Jumariah	Jl. Manggarupi	Campuran
		16	Risal Muin	Jl. Mannuruki	Pulsa
				17	Sumiati
		18	Muammar St	Jl. Baiturrahman	Sepatu
		19	Solikin	Jl. Sunu	Sari Laut
		20	Ajrul Hakim Anwar Sh	Jl. Dg. Tata	Gitar
		21	Nuralim	Jl. Btn Minasa Upa	Pulsa
		22	Darwis	Panaikang	Bengkel
		23	Hikmah	Jl Karunrung Raya	Warung Kopi
		24	Syarifuddin	Jl. Sultan Alauddin	Stiker
		25	Sanneng Dg. Sore	Kampung Parang	Campuran
		26	Januari Dg. Dalle	Kampung Parang	Campuran

		27	A. Mahatir	Lebbae	Campuran
		28	Indah Permata Sari	Jl. Malengkeri	Baju
		29	Musaddi	Jl. Sultan Alauddin	Baju/Celana
		30	Syarirah Nur Insana	Jl. Bonto Manai	Gorengan
		31	Ibu Sri Ernawati	Jl. Syekh Yusuf	Boneka
		32	Ryansyah Pratama. C	Jl. Bontonompo	Helm
		33	Raja	Jl. Pettarani	Pakaian
		34	Dg. Serre	Jl. Alauddin	Campuran
		35	Israaq	Jl. Alauddin	Campuran
		36	Hama Ali	Jl. Manuruki	Kacamata
		37	Dg. Talli	Jl. Je'ne Tallasa	Buah
		38	Tarip	Sidorejo	Sari Laut
		39	Anas	Jl. Bontoduri	Campuran

Daftar Pedagang Kaki Lima yang direlokasi ke Kanrerong Kecamatan Rappocini

NO	NAMA KELURAHAN	NO	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	NAMA UKM
<b>1</b>	<b>KEL. GUNUNG SARI</b>	1	Dg. Sabutu	Jl. Bonto Duri	Penjual Es Kelapa Muda
		2	Safar/Dg. Maju	Jl. Bonto Duri	Penjual Es Kelapa Muda
		3	Asi	Jl. Bonto Duri	Penjual Es Kelapa Muda
		4	Saldi	Jl. Gowa Graha Matahari	Penjual Es Kelapa Muda
		5	Dg. Serang	Jl. Bonto Duri	Penjual Es Kelapa Muda
		6	Sartika	Jl. Syekh Yusuf Gowa	Penjual Es Kelapa Muda
		7	Samsinar/Lina	Jl. Bonto Duri	Penjual Es Kelapa Muda
		8	Mariama	Jl. Tinumbu	Penjual Es Kelapa Muda
		9	Dg. Taba	Jl. Sultan Alauddin 2	penjual bakso
<b>2</b>	<b>KEL. BANTA-BANTAENG</b>	1	Budiman	Jl. Dg.Tata 3 Lr 8	Barang Campuran
		2	Nasaruddin Arsyad	Jl. Dg.Tata 3 Lr 8	Barang Campuran
		3	Darmawati	Pallangga	Barang Campuran
		4	Hasrianti	Jl. Sero No.37 Gowa	Barang Campuran
		5	Suherman	Jl. Dg.Tata 3 Lr 8	Barang Campuran
		6	Syamsiah	Jl. Toddopuli XV Baru	Barang Campuran
		7	Sarif	Jl. Antang Raya	Barang Campuran
		8	Kasmawati	Jl. Beringin	Barang Campuran

		9	Sarilu Dg Timang	Jl. Maccini pasar malam 4	Barang Campuran
		10	Andi Hasnah	Jl. Yos Sudarso Lr 153	Barang Campuran
		11	Hawati S Dg. Lebong	Jl. Maccini Pasar Malam	Barang Campuran
		12	Irwan	Asana Kab. Gowa	Barang Campuran
		13	Jumariah	Padang Malullu Gowa	Barang Campuran
		14	Dg. Bau	Jl. Pengayoman Blok F	Barang Campuran
		15	Hasriani Dg. Ngai	Jl. Kampung Parang Barombong	Barang Campuran
		16	Kadir	Jl. RSI Faisal 17 Lr.1	Barang Campuran
		17	Risal Dg. Ngappi	Jl. Beringin Timur	Barang Campuran
		18	Ilyas	Jl. Faisal XI	Sate Ayam
		19	Suhud	Jl. Rajawali XIII	Sari Laut
		20	Rusli	Jl. Pettarani	Buah
3	KEL. BUAKANA	1	Rusina	Toddopuli 15 Baru	Barang Campuran
		2	Nurliah	Jl. Bontocinde No.10 Lr1	Barang Campuran
		3	Ratna Sari Dewi	Jl. Bontocinde	Pot Gorong-gorong
		4	Anto	Jl. Pampang	Penjual Es Kelapa
		5	Ismail Dg. Cini	Jl. Bonto Sunggu	Duplikat Kunci
		6	Ancu	Gowa	Pres Ban
		7	Yusuf Dg.Nai	Jl. Monumen Emmy Saellan Lr7	Barang Campuran
		8	Lebong	Kasomberang Gowa	Barang Campuran
		9	Dg. Lalang	Jl. Bontocinde	Barang Campuran/Pres Ban
4	KEL. TIDUNG	1	Dg. Tinri	Jl. Tidung	Barang Campuran
		2	dg. Haris	Jl. Tidung	Barang Campuran

1. Wawancara dengan Anggota Bagian Trantib Kecamatan Rappocini



2. Wawancara dengan Kepala Bagian Trantib Kecamatan Makassar



3. Wawancara dengan Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Makassar



4. Wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Makassar



5. Wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima





## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Syarifah Huzaifah disapa Ipeh. Lahir pada tanggal 26 July 1998, Desa Ulidang Kecamatan Tammero'do Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Anak pertama dari pasangan suami istri Hj. Harti dan S. Haedar Al Hasani.

Penulis menempuh pendidikan di SD Inpres 30Ulidang Kabupaten Majene dan selesai pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sendana Kabupaten Majene dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2Majene Kabupaten Majene dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberi manfaat.